



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG /JASA DALAM PROSES
PEMBORONGAN BANGUNAN DI KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATRA BARAT TAHUN 2006-2007**

TESIS



**ELFINUR BERMAWI
06211001**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2008**

ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PROSES PEMBORONGAN BANGUNAN DI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT

RINGKASAN

(Elfinur Bermawi, Program Ilmu Hukum Pascasarjana Unand, 129 halaman, 2008)

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah salah satu kegiatan yang menyangkut pengelolaan keuangan Negara. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu agenda penting yang harus ditanggapi secara obyektif oleh setiap komponen yang terlibat didalamnya. Agar pelaksanaan kegiatan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka pengelolaan kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian berbagai kegiatan dan sumber daya manusia mutlak diperlukan melalui system manajemen yang baik. Dalam kaitan manajemen keuangan, maka terdapat empat hal pokok yang perlu perhatian khusus, yaitu aspek administrasi, teknis, keuangan dan legal. Cara untuk memilih penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang akan diadakan disebut metode pengadaan barang/jasa. Dalam pengadaan jasa pemborongan objeknya nyata, baik kualitas maupun kuantitasnya, bisa diukur, sehingga harganya bisa dikalkulasi/dihitung. Dengan demikian dalam pengadaan jasa pemborongan yang dipersaingkan itu adalah penawaran harganya. Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode lelang (pelelangan umum dan pelelangan terbatas), pemilihan langsung atau penunjukan langsung. Metode lelang adalah paling tepat digunakan dalam pengadaan barang/jasa. Namun demikian untuk hal yang sifatnya spesifik, metode pemilihan langsung atau penunjukan langsung dapat dilakukan. Metode pelelangan umum adalah metode yang paling banyak digunakan kalau nilai pemborongannya lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dengan metode ini akan dapat menjaring calon penyedia jasa pemborongan sebanyak-banyaknya karena harus diumumkan secara luas dan terbuka, sehingga akan terjadi persaingan yang luas diantara calon penyedia jasa pemborongan. Dalam pengadaan jasa pemborongan di Kantor Wilayah Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, metode tersebut sudah diterapkan, namun hasil pekerjaannya belum optimal. Ada sebagian pekerjaan yang sudah selesai dan sudah dilakukan serah terima pekerjaan rusak, bahkan salah satu kegiatan yaitu pembangunan gedung dua lantai tahun 2006 gagal diselesaikan oleh pemborong.

Permasalahan yang dikemukakan adalah apakah proses pengadaan jasa pemborongan bangunan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat sudah sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan apa saja kendala-kendala dalam proses pengadaan jasa pemborongan bangunan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat?

Penelitian dilakukan dengan tipe penelitian yuridis sosiologis dan lokasi penelitian adalah di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, sedangkan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.

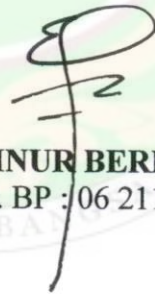
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan jasa pemborongan belum sepenuhnya sesuai dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003. Kendala-kendala yang dihadapi adalah: ada pos tertentu yang seharusnya didukung oleh dana tapi tidak tersedia anggarannya; Masih rendahnya kualitas staf untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa terutama dalam memahami aturan main mengenai pengadaan barang/jasa, sehingga belum sepenuhnya berpedoman pada peraturan yang berlaku. Selain itu masih adanya usaha-usaha untuk melakukan persekongkolan tender oleh para penyedia barang/jasa sehingga mengganggu jalannya proses tender.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi tesis yang saya tulis dengan judul :
“ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PROSES PEMBORONGAN BANGUNAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT TAHUN 2006-2007” adalah hasil kerja/karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan. Jika dikemudian hari pernyataan ini ternyata tidak benar, maka kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, 15 November 2008

Yang membuat pernyataan,



ELFINUR BERMAWI
No. BP : 06 211 001

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sungayang Batusangkar tanggal 27 Mei 1955. Menyelesaikan Sekolah Dasar dan SMP di Sungayang dan SMA di Pekan Baru Riau. Tamat Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 1980. Tahun 1982 mulai bekerja di BPHN Departemen Kehakiman. Pindah tugas ke Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Barat tahun 1990. Tahun 1997 di mutasikan ke Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulawesi Tenggara di Kendari sebagai Kepala Bidang Hukum dan Badan Peradilan. Tahun 2001 dimutasikan lagi ke Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Kemudian Melanjutkan S2 pada Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang dengan Program Studi Ilmu Hukum mulai sejak tahun 2006. Tahun 2008 dimutasikan ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah di Palangka Raya sebagai Kepala Divisi Administrasi sampai sekarang.

Penulis mempunyai seorang isteri bernama Darmitza Elfinur dan tiga orang anak yang bernama : Dinny Afifi Elfinur, S.IP; Ridho Dwinanda dan Andita Mayestika.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis ini dengan baik, guna memenuhi syarat untuk mengikuti ujian Comprehensive Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas Padang.

Dalam penulisan tesis ini, sesuai dengan permasalahan yang penulis ajukan, maka penulis memberi judul **Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Dalam Proses Pemborongan Bangunan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat Tahun 2006-2007.**

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sebagaimana yang diharapkan dan banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu penulis mengharapkan sumbang saran yang konstruktif atau masukan yang sifatnya membangun dari pembaca sebagai perbaikan dalam mewujudkan kesempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang menjadikan dorongan moril untuk penyempurnaan tesis ini seperti yang diharapkan. Dengan setulus hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH dan Bapak Yuslim, SH, MH sebagai Ketua dan Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingan sejak dari penyusunan proposal, penelitian, dan penulisan tesis ini.

2. Bapak Prof. Sofyan Thalib, SH, MH, Bapak Yoserwan, SH, LLM, dan Bapak Frenadin Ade Gustara, SH, MS, selaku dosen undangan yang telah memberikan saran untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
3. Bapak Direktur, Bapak Asdir, Bapak Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum serta Bapak/Ibu Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang.
4. Istriku tercinta Darmitza Elfinur dan anak-anakku Dinny Afifi Elfinur, Ridho Dwinanda dan Andita Mayestika. Terima kasih atas dorongan dan iringan doanya untuk membuatku lebih maju.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.
6. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas Padang, khusubya BP 2006.

Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian yang dituangkan dalam tesis ini, akan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa dan Hukum Perdata pada umumnya di Indonesia.

Padang, November 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR TABEL.....v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah1

B. Perumusan Masalah.....11

C. Tujuan Penelitian.....11

D. Manfaat Penelitian11

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....12

F. Metode Penelitian25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemborongan.....29

B. Letak Perjanjian Pemborongan Dalam Hukum Perikatan.....34

C. Ketentuan-ketentuan Yang Mengatur Perjanjian Pemborongan.....37

D. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....41

E. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.....47

F. Prinsip-prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Publik di Indonesia....50

G. Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa.....58

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pemborongan Bangunan.....62

B. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa.....106

C. Kendala-kendala Dalam Proses Pemborongan Bangunan Di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat109

D. Analisis terhadap Pengadaan Barang/Jasa dan Kendala-kendala yang dihadapi dalam Proses Pemborongan Bangunan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat Tahun 2006-2007.....116

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN122

B. SARAN.....124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Jadwal Penyusunan DIPA Departemen Hukum dan HAM.....	66
Tabel 2 : Paket-Paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TA 2006-2007.....	69
Tabel 3 : Metode Pemilihan Penyedia Jasa Pemborongan TA 2006-2007.....	72
Tabel 4 : Daftar Konsultan Perencana Pembangunan Sarana dan Prasarana TA 2006-2007.....	80
Tabel 5 : Daftar Pemborong Pembangunan Sarana dan Prasarana TA 2006-2007.....	81
Tabel 6 : Daftar Harga Penawaran Peserta Pelelangan Umum Pembangunan Gedung Dua Lantai Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat tahun 2006.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi Pemerintahan sangat ditentukan oleh fungsi perundang-undangan dan fungsi peradilan. Dalam menjalankan fungsinya, Pemerintah melakukan tindakan-tindakan berupa keputusan-keputusan, ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan nyata.¹ Untuk mencapainya Pemerintah meletakkan hukum pada suatu tempat yang tertinggi maka hukum dapat memberikan keyakinan pada masyarakat dengan menghormati dan menjalankan hukum maka tercapainya cita-cita bernegara. Hukum dalam arti di sini, adalah hukum positif, hukum masyarakat (*indigenous law*) dan hukum yang hidup (*living law*).² Masyarakat dan penyelenggara negara dengan menghormati hukum dan menerima hukum maka terjamin kenyamanan, keserasian, ketertiban seperti yang diidealkan sebagai tujuan dari hukum.

Kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan fungsi Pemerintahan sering terjadi hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan-perbuatan pemerintah sebagai berikut :³

1. Adanya kepentingan pribadi yang tidak dihiraukan.
2. Adanya perbuatan yang membeda-bedakan (diskriminatif) terhadap sesama warganya.

¹ Philipus M. Hadjon, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajahmada University Pers, Yogyakarta, hlm 6

² Otje Salman, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, hlm 37

³ Philipus M. Hadjon, *op cit*, hlm 5.

Unsur yang harus dicapai dari penyalahgunaan kewenangan adalah adanya perbuatan (*handelingen*) yang dilakukan oleh subjek hukum yang dalam hal ini penyelenggara negara (*bestuur*) dikategorikan atas perbuatan yang menimbulkan akibat hukum dan perbuatan biasa⁴. Perbuatan dalam administrasi publik yang berarti adalah perbuatan hukum sedangkan perbuatan yang bukan hukum adalah *irrelevant* (tak berarti)⁵. Lapangan hukum yang konvensional dibagi atas lapangan hukum privat dan lapangan hukum publik. Penyelenggara negara dapat melakukan hubungan-hubungan hukum dalam kedua lapangan hukum tersebut baik lapangan hukum privat maupun lapangan hukum publik. Contoh dalam perbuatan hukum penyelenggara negara dalam lapangan hukum privat adalah penyertaan saham negara atau daerah pada BUMN dan BUMD. Sedangkan lapangan hukum publik adalah kelaziman pelaksanaan sejumlah kewenangan untuk menyelenggarakan negara dalam hukum publik seperti melaksanakan pembangunan, menegakkan aturan, membuat sejumlah peraturan dan sebagainya⁶.

Perbuatan dalam lapangan hukum publik dikategorikan sebagai perbuatan hukum publik yang bersegi dua (*tweezijdige public rechtelijke handelingen*) dan perbuatan hukum bersegi satu (*eenzijdige public rechtelijke handelingen*)⁷. Yang dimaksud bersegi satu adalah perbuatan hukum tersebut tanpa ada kompromis (kesepakatan) antara pihak satu dengan pihak lainnya, sedangkan bersegi dua dimaksud apabila adanya kompromis antara para pihak⁸. Perbuatan hukum bersegi dua

⁴ Utrecht, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, ed ke 4, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, hal 63.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

(perjanjian dalam lapangan hukum publik) dapat terjadi seperti perjanjian *kortverband contract* (kontrak kerja jangka pendek) yang ditandatangani antara pemerintah dan swasta untuk sebuah pekerjaan dan perbuatan hukum tersebut diatur dalam lapangan hukum istimewa yaitu lapangan hukum publik yang tidak diatur oleh lapangan hukum biasa atau hukum privat.⁹

Dalam pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan perbuatan hukum yang dikategorikan bersegi satu apabila pemerintah menetapkan bahwa pengadaan tersebut dilaksanakan dengan swakelola. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri.¹⁰ Sedangkan perbuatan pemerintah yang bersegi dua (bentuk perjanjian lelang yang diketahui oleh kedua belah pihak yaitu pemerintah dan pihak penyedia barang dan jasa) atau kompromis dapat kita lihat pada proses pengadaan dilakukan yaitu adanya tawar menawar harga proyek antara pemerintah dan swasta.

Proses pengadaan jasa pemborongan bangunan merupakan demokratisasi dalam berusaha seperti yang diatur oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Disamping itu lelang merupakan usaha tranpasransi proyek, partisipasi masyarakat/swasta; *equality* (keadilan), *competitive* (persaingan); dalam melakukan transaksi. Hal hal yang diatur di atas merupakan prinsip yang harus dijaga dalam setiap pelelangan dari proyek dan pengadaan barang dan jasa dalam proses pemborongan bangunan.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Lihat Pasal 37 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

proses tersebut terjadi cacat lelang maka lelang dapat dibatalkan karena cacat prosedur lelang.

Peraturan Perundang-undangan nasional yang khusus mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah sebanyak 7(tujuh) kali yaitu : Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (perubahan pertama); Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (perubahan kedua); Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 (perubahan ketiga); Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 (perubahan keempat); Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 (perubahan kelima); Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 (perubahan keenam); terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

Dalam Pasal 5 Keppres No. 80 Tahun 2003 menyatakan tentang etika pengadaan barang yang isinya :

"Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*).
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.

- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Agar tujuan pengadaan barang dan jasa dapat tercapai dengan baik, maka semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus mengikuti norma yang berlaku. Sebagaimana norma lain yang berlaku, norma pengadaan barang dan jasa terdiri dari norma yang tidak tertulis dan norma yang tertulis. Norma yang tidak tertulis pada umumnya norma yang bersifat ideal, sedangkan norma yang tertulis pada umumnya norma yang bersifat operasional.¹³ Norma ideal pengadaan barang dan jasa antara lain yang tersirat atau pengertian tentang hakekat, filosofi, etika, profesionalisme dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Sedangkan norma pengadaan barang dan jasa yang sifatnya operasional pada umumnya telah dirumuskan dan dituangkan dalam Peraturan perundang-undangan berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan lain-lain serta ketentuan-ketentuan lain seperti pedoman, petunjuk dan sebagainya.

Sebelum Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ini lahir, ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa tidak diatur secara khusus akan tetapi diatur pada beberapa pasal dalam Keppres tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semenjak dimulainya REPELITA I pada tahun 1969 sampai

¹³ Indonesia Procurement Watch, 2006, *Prinsip-prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*.

Pengadaan barang dan jasa melibatkan dana yang sangat besar, 30% (tiga puluh persen) lebih APBN kita digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Angka tersebut belum termasuk dana yang dikelola oleh lembaga negara lainnya seperti BUMN, BUMD, Kontraktor Kemitraan dan belum mencakup seluruh anggaran Pemerintah Daerah. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu lahan korupsi yang paling subur. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa dari 43 kasus yang ditangani KPK saat ini, 34 kasus (77%) diantaranya adalah kasus pengadaan barang dan jasa. Dan dari 3 kasus saja, telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 200 milyar lebih. Tidak berbeda dengan apa yang dilaporkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahwa 70% kasus yang ditangani lembaga ini adalah kasus penyimpangan dan persekongkolan pengadaan barang dan jasa.¹⁴

Kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa bisa jadi merupakan mis manajemen yang parah atau merupakan bagian dari korupsi sistemik yang merajalela dalam berbagai sektor dan struktur Pemerintahan di Indonesia. Berbagai masalah yang bersifat struktural dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Indonesia, menyebabkan tidak berfungsinya sistem pengadaan barang dan jasa publik secara baik, transparan dan profesional. Berbagai masalah masih melingkapi proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa Pemerintah.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Dalam hal pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah, terdapat 3 (tiga) bidang hukum yang secara langsung dan tidak langsung mengaturnya, yaitu sebagai berikut :

1. Hukum Administrasi Negara / Hukum Tata Usaha Negara.

Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa. Dalam proses ini, pengguna barang dan jasa Instansi Pemerintah (kepada Kantor/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen) bertindak sebagai pejabat-pejabat negara bukan mewakili negara sebagai individu/pribadi. Semua keputusan yang dikeluarkan pada proses ini merupakan keputusan pejabat negara atau publik. Kalau ada pihak yang dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tersebut, dapat mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis atas putusan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Hukum Perdata

Hukum perdata mengatur hubungan antara penyedia dan pengguna barang dan jasa sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak pengadaan barang dan jasa. Dalam proses ini diwakili oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen.

3. Hukum Pidana

Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna barang dan jasa sejak tahap persiapan pengadaan barang dan jasa sampai

dengan selesainya kontrak barang dan jasa. Hukum pidana baru ditetapkan kalau ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pihak pengguna atau pihak penyedia dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Proses pengadaan barang dan jasa dalam proses pemborongan bangunan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat pada umumnya dilakukan melalui proses lelang, hal ini dilakukan guna mendapatkan spesifikasi pemborong yang benar-benar bertanggung jawab, dan merupakan bentuk pengamanan keuangan negara yang diisyaratkan melalui pelaksanaan pekerjaan pemborongan untuk Pemerintah. Pemborong harus diketahui kemampuan dasarnya pada masing-masing bidang pekerjaan sesuai dengan spesialisasinya. Kegiatan menilai kemampuan dasar pemborong sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi spesialisasinya disebut kualifikasi. Permasalahan muncul dalam hal proses penyaringan pemborongan sampai selesainya proyek pemborongan itu sendiri.

Proses pengadaan barang dan jasa, khususnya jasa pemborongan bangunan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat pada umumnya sudah mengacu pada ketentuan Keppres Nomor 80 tahun 2003, namun hasil pekerjaan yang dilaksanakan belum optimal. Ada sebagian pekerjaan yang sudah selesai dan sudah dilakukan serah terima kemudian ada yang rusak. Bahkan salah satu kegiatan/proyek yaitu Pembangunan Gedung Dua Lantai gagal diselesaikan oleh pemborong. Proyek tersebut realisasi fisiknya hanya 65,54 % sehingga tidak bisa dimanfaatkan dan terlantar, dan baru pada tahun anggaran 2008 ini turun anggaran untuk penyelesaiannya.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka perumusan masalahnya adalah :

1. Mengapa hasil pekerjaan pemborongan bangunan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak optimal ?
2. Apa saja kendala-kendala dalam proses Pengadaan Penyedia Jasa Pemborongan Bangunan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkan hasil pekerjaan pemborongan bangunan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat tahun 2006-2007 tidak optimal dan bahkan ada bangunan yang tidak selesai dilaksanakan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses Pengadaan Penyedia Jasa Pemborongan Bangunan Di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, antara lain:

- a. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka penyempurnaan pengaturan tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

b. Secara Praktis.

Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Efektivitas Hukum

Efektifitas daripada hukum dapat mengubah tingkah laku masyarakat, dalam arti kata tugas hukum adalah mengubah masyarakat. Hukum dalam kedudukannya tidak berpihak pada masyarakat-masyarakat tertentu, walaupun dalam masyarakat tersebut terkandung unsur yang berbeda-beda, menyangkut kepentingan-kepentingan, kepercayaan dan pola-pola kelakuan dari derajat organisasi.¹⁶

Menurut Roscoe Pound, hukum menjadi alat kontrol sosial yang paling penting, dimana hukum mengandung monopoli tidak hanya terhadap masyarakat tetapi juga kekuasaan. Hukum sebagai alat kontrol sangat diperlukan untuk menciptakan tertib hukum karena itu diperlukan pembatasan-pembatasan terhadap kontrol sosial yang efektif melalui hukum.¹⁷ Dalam karangannya Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum perlu memperhitungkan fakta-fakta sosial dalam pekerjaannya, apakah perbuatan hukum itu ataukah penaksiran serta penerapan atauran-aturan hukum. Pound menganjurkan agar perhatian diarahkan kepada efek-efek nyata dari institusi-

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 183.

¹⁷ *Ibid*

institusi serta doktrin-doktrin hukum. Kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya atau efektifitas hukum itu sendiri.

Berkaitan dengan teori Roscoe Pound diatas, maka Prinsip-prinsip Pengadaan barang/jasa yang diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut :¹⁸

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Terbuka dan bersaing, berarti berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
6. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

b. Teori Good Governance

Banyak pembahasan yang mengemukakan teori *good governance* mengingat terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*clean and good governance*) telah lama menjadi cita-cita dan harapan setiap

¹⁸ Lihat Pasal 3 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

bangsa. Dari segi gramatikal *Good Governance* terdiri dari dua kata ‘good’ dan ‘governance’. Dan makna dari kedua kata ini secara terpisah maupun setelah digabungkan menjadi suatu konsep banyak dirumuskan dalam berbagai pendapat, antara lain:

1. Lembaga Administrasi Negara (LAN) menegaskan bahwa *governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services*. Praktik terbaiknya disebut *good governance* (pemerintahan yang baik).¹⁹

Disebut pemerintahan yang baik, karena kata *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.²⁰

Berdasarkan uraian diatas LAN kemudian menyimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, yakni dengan menjaga ‘kesinergian’ interaksi yang konstruktif diantara *domain-domain* negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*).²¹

¹⁹Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, hlm. 1

²⁰ *Ibid*, hlm. 6

²¹ *Ibid*, hlm. 8

2. United Nations for Development Program (UNDP) pada tahun 1997 mendefinisikan bahwa *governance* adalah : “*The exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country's affairs at all levels and means by which state promote social cohesion, integration and ensure the well being of their population*“(Pelaksanaan kewenangan/ kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administrative untuk mengelola berbagai urusan negara guna mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat).²²

Hasil *workshop* UNDP tahun 1997 sebagaimana dikutip oleh Dr. Joko Widodo M.S kemudian juga menyimpulkan bahwa sistem pemerintahan yang baik adalah partisipasi yang menyatakan bahwa semua anggota institusi *governance* memiliki suara dalam mempengaruhi pembuatan keputusan.²³

Hal itu merupakan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi. Prosedur dan metode pembuatan keputusan harus transparan, agar memungkinkan terjadinya partisipasi efektif. Siapa saja yang dipilih untuk membuat keputusan dalam pemerintahan, organisasi bisnis, dan organisasi masyarakat sipil harus bertanggung jawab kepada publik, serta kepada institusi. Institusi *governance* harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan rakyat, memfasilitasi dan

²² Adi Sujatno, 2007, *Moral dan Etika Kepemimpinan merupakan Landasan ke arah Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, hlm. 41-42

²³ Joko Widodo M.S, 2007, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, Bayuputra, Malang, hlm.115

berbagai isu yang ada, pemerintah menyediakan saluran komunikasi agar rakyat dapat menyalurkan partisipasi aktifnya.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dan kegiatan-kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*).

Senada dengan ketiga pilar diatas UNDP sebagaimana dikutip oleh LAN berpendapat bahwa Strategi Kepemimpinan untuk mewujudkan *good governance* mengacu kepada “Dasar-dasar Kepemerintahan yang Baik” yang meliputi hal-hal sebagai berikut²⁶:

1. *Partisipasi*: Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan, dan memiliki kebebasan berpendapat dan berserikat secara konstruktif.
2. *Aturan Hukum (Rule of law)*: Hukum dan keadilan harus ditegakkan tanpa diskriminatif.
3. *Transparansi*: Berbagai proses kelembagaan dapat diakses secara bebas oleh mererka yang membutuhkan.
4. *Daya Tanggap (Responsiveness)*: Setiap institusi dan prosesnya harus diupayakan untuk melayani stakeholders.
5. *Berorientasi Konsensus*: Pemerintah bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus.
6. *Berkeadilan (Equity)*: Memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki maupun perempuan untuk memlihara dan meningkatkan kualitas hidupnya.
7. *Efektivitas dan efisiens*: Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya atas berbagai sumber daya yang tersedia.
8. *Akuntabilitas (Accountability)*: Semua elemen masyarakat (Negara, swasta, dan masyarakat madani) harus membuat pertanggungjawaban kepada publik.
9. *Bervisi strategic*: Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan berjangka panjang terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan manusia, dan lingkungan.

²⁶ Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan, 2000, *Akuntabilitas dan Good Goveranance*, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, hlm. 7

Kutipan yang sama juga terdapat pada Adi Sujatno, 2007, *Moral dan Etika Kepemimpinan merupakan Landasan ke arah Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, hlm. 50-51

10. *Saling keterkaitan (Interrelated)* : Keseluruhan prinsip-prinsip diatas harus bersinergi dan saling terkait (*mutually reinforcing*) dan tidak bisa berdiri sendiri.

Berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka landasan teori good governance yang akan digunakan untuk menganalisis dan menjawab perumusan masalah penelitian adalah mengacu pada ketiga pilar yang menjadi elemen dasar Pemerintahan yang Baik dan Strategi Kepemimpinan untuk mewujudkan *good governance* mengacu pada “Dasar-dasar Pemerintahan yang Baik” dari UNDP.

c. Aspek Hukum Perjanjian

Dalam hukum Indonesia yang mengadopsi prinsip hukum Eropa Kontinental dianut bahwa kontrak atau perjanjian pada umumnya merupakan sumber perikatan (Pasal 1233 KUHPerdata). Sesuai Pasal 1338 KUHPerdata menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah ”berlaku sebagai undang-undang” untuk mereka yang membuatnya,²⁷ maksud dari kalimat itu tidak lain, bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak.

Perjanjian ini pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang, dalam Pasal 1338 KUHPerdata itu ditetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, maksud

²⁷ Subekti, 1986, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm 139.

kalimat itu bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.²⁸

Menurut Pasal 1601 b KUHPdata, perjanjian pemborongan adalah perjanjian dengan mana pihak satu (si pemborong), mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, (pihak yang memborongkan), dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

Jadi dalam perjanjian pemborongan hanya ada dua pihak yang terikat dalam perjanjian pemborongan yaitu :²⁹

1. Pihak kesatu disebut pihak yang memborongkan atau prinsipal, (Aanbesteder, Bouwheer, Kepala Kantor, Satuan Kerja, Pemimpin Proyek).
2. Pihak kedua disebut pemborong atau Rekanan, Kontraktor, (Aanemer).

Perjanjian pemborongan diatur dalam Pasal 1604 s/d 1617 KUHPdata dan peraturan-peraturan khusus yang dibuat Pemerintah seperti Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam hukum kontrak terdapat beberapa teori yaitu³⁰ :

1. Teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak.
2. Teori berdasarkan formasi kontrak
3. Teori Dasar yang klasik
4. Teori tentang tanggungjawab hukum
5. Teori kebebasan berkontrak.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ FX. Djumaldi, 1987, *Perjanjian Pemborongan*, PT. Bina Aksara, Jakrta, hlm 6.

³⁰ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Edisi II*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm 4

Perkembangan pengadaan barang dan jasa dimulai sejak adanya pasar dimana orang dapat membeli dan menjual barang.³¹ Cara atau metode yang digunakan dalam jual beli barang di pasar adalah dengan cara tawar menawar secara langsung antara para pihak pembeli atau pihak pengguna dengan pihak penjual atau pihak penyedia barang. Apabila dalam proses tawar menawar telah tercapai kesepakatan harga, maka dilanjutkan dengan transaksi jual beli, yaitu pihak penyedia barang menyerahkan barang kepada pihak pengguna dan pihak pengguna membayar berdasarkan harga yang telah disepakati kepada pihak penyedia barang. Proses tawar menawar dan proses transaksi jual beli dilakukan secara langsung tanpa didukung dengan dokumen pembelian ataupun dokumen pembayaran dan penerimaan barang. Apabila barang yang akan dibeli jumlah dan jenisnya banyak, dan setiap jenis barang tersebut dilakukan tawar-menawar, maka akan memakan waktu. Untuk menghemat waktu, pengguna menyusun secara tertulis jenis dan jumlah barang yang akan dibeli, selanjutnya diberikan kepada penyedia barang untuk mengajukan penawaran secara tertulis pula. Daftar barang yang disusun secara tertulis tersebut kiranya menjadi asal-usul dokumen pembelian, sedangkan penawaran harga yang dibuat secara tertulis merupakan asal-usul dokumen penawaran. Selanjutnya pihak pengguna dalam menyampaikan daftar barang yang akan dibeli tidak hanya kepada satu penyedia barang saja akan tetapi kepada beberapa penyedia barang. Dengan meminta penawaran kepada beberapa penyedia barang, pengguna dapat memilih harga penawaran yang paling

³¹ *Ibid.*

murah dari setiap jenis barang yang akan dibeli. Cara tersebut kiranya yang menjadi cikal-bakal pengadaan barang dengan cara lelang.

Pengadaan barang dan jasa melibatkan dua pihak, yaitu pihak pembeli atau pengguna dan pihak penjual atau penyedia barang dan jasa. Pembeli atau pengguna barang dan jasa adalah pihak yang membutuhkan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan, pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuat barang atau melaksanakan pekerjaan tertentu. Pengguna barang dan jasa dapat merupakan suatu lembaga/organisasi dan dapat pula orang perorangan. Tergolong lembaga antara lain : Instansi Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota), badan usaha (BUMN, BUMD, Swasta), dan organisasi masyarakat. Sedangkan yang tergolong perorangan individu atau orang yang membutuhkan barang dan jasa.

Penyedia barang dan jasa adalah pihak yang melaksanakan pemasokan atau mewujudkan barang atau melaksanakan pekerjaan atau melaksanakan layanan jasa berdasarkan permintaan atau perintah resmi atau kontrak pekerjaan dari pihak pengguna. Penyedia barang dan jasa dapat merupakan badan usaha, atau orang perseorangan. Penyedia yang bergerak dalam bidang pemasokan barang disebut pemasok atau leveransir, bidang jasa pemborongan disebut pemborong atau kontraktor, dan bidang jasa konsultasi disebut konsultan.

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara internasional yaitu efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminasi dan akuntabilitas.³²

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Hukum

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak.³³

Menurut E.M. Meyers dalam bukunya "*De Algemene begrippen van het Burgelijk Recht*", sebagaimana dikutip oleh CST. Kansil, Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi Penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.³⁴

Menurut Leon Duguit, sebagaimana dikutip oleh CST. Kansil, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.³⁵

Sedangkan menurut Immanuel Kant, sebagaimana dikutip oleh CST. Kansil, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak

³² Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bandung, Fokusmedia.

³³ WJS. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm 363

³⁴ CST. Kansil, 1979, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 34

³⁵ *Ibid.*

bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.³⁶

Negara Hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam Undang-Undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan Hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan Hukum. Negara hukum itu ialah Negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh Undang-Undang. (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam Negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh Negara terhadap Negara, sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada segala Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Negara.³⁷

b. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa

Ada beberapa pengertian atau konsep-konsep yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yaitu :³⁸

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
2. Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin kegiatan bagian proyek/pengguna anggaran daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu.
3. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ D Mutiar'as, *Ilmu Tata Negara Umum*, Pustaka Islam, Jakarta, hlm 20.

³⁸ Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bandung, Fokusmedia

4. Kepala kantor/satuan kerja adalah pejabat struktural departemen/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja rutin APBD.
5. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat di lingkungan Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja APBD.
6. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
7. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
8. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
9. Jasa pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa.
10. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia/pejabat pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan.

Perjanjian pemborongan dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau lisan.

Dalam praktek, apabila perjanjian pemborongan menyangkut biaya yang besar, biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara tertulis. Untuk proyek-proyek Pemerintah. Perjanjian pemborongan biasanya dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir-formulir tertentu.³⁹ Perjanjian pemborongan dibuat dengan perjanjian standar karena menyangkut keuangan negara yang besar jumlahnya dan untuk melindungi keselamatan umum. Arti

³⁹ FX. Djumialdji, *Op cit*, hlm 4

perjanjian standar adalah perjanjian yang dibuat dalam perjanjian standar yaitu :⁴⁰

1. Dengan penunjukan yaitu dalam perjanjian standar dimuat ketentuan yang menunjuk pada peraturan standar.
2. Dengan menandatangani peraturan standar dirumuskan dalam perjanjian standar.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang bertitik tolak dari data primer⁴¹, sehingga nantinya penelitian ini dapat menggambarkan jawaban permasalahan secara cermat dan sistematis sehingga bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu.⁴²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 56.

⁴² Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 36.

3. Metode dan Alat Pengumpulan Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, data ini diperoleh dengan mendatangi sumber data yang relevan dengan masalah penelitian. Teknik pengambilan data dari sumber tersebut dengan cara melakukan wawancara dengan responden baik dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pemborongan bangunan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat yaitu Kepala Divisi Administrasi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan para panitia. Disamping itu juga menggunakan metode partisipatif (*Participant Observer*) yaitu perolehan data berdasarkan pengalaman sebagai Pimpro atau panitia pengadaan barang/jasa.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka maupun dari dokumen berupa bahan hukum. Data ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, tulisan-tulisan ilmiah hasil penelitian yang ada kaitannya pemborongan bangunan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

Adapun data sekunder yang diperoleh terdiri dari :

a) Bahan hukum primer :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

b) Bahan hukum sekunder :

1. Buku-buku berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, Dokumen Perencanaan, Dokumen Lelang, Kontrak dll.
2. Artikel hukum dalam jurnal, majalah dan koran.

c) Bahan hukum tersier :

1. Kamus Umum Bahasa Indonesia.
2. Kamus Terminologi Hukum Inggris-Indonesia.
3. Black's Law Dictionary.

Adapun teknik pengumpulan data tersebut di atas dengan melakukan studi dokumen dan studi kepustakaan yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian yang diambil dari dokumen atau bahan pustaka atau literatur. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga. Untuk mendapatkan data ini, peneliti melakukan penelusuran literatur atau studi kepustakaan, baik yang peneliti miliki sendiri maupun literatur yang telah tersedia di pustaka serta studi terhadap dokumen yang tersedia berkaitan dengan pemborongan bangunan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, dilakukan pengolahan data dengan cara merapikan data yang diperoleh di lapangan yang masih merupakan data mentah atau belum tersusun dengan rapi. Dalam pengolahan data ini, penulis menggunakan fasilitas komputer, dengan menggunakan kegiatan *data entry* yaitu kegiatan memasukkan data yang diperoleh kedalam komputer yang selanjutnya dilakukan pengeditan sehingga dapat digunakan dalam menganalisis masalah penelitian. Selanjutnya dilakukan penganalisisan yaitu kegiatan yang dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pengolahan terhadap data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Adapun metode atau cara analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis terhadap data yang tidak bisa dihitung dan tidak menggunakan alat bantu statistik. Untuk menjawab permasalahan yang ada, data ini juga dianalisis secara kualitatif yaitu menghubungkannya dengan teori efektifitas hukum, good governance dan aspek hukum perjanjian serta pendapat para sarjana yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemborongan

Dalam KUHPerdara digunakan istilah persetujuan yang merupakan terjemahan dari "*overeenkomst*" walaupun pembuat Undang-undang tidak memberikan penegasan lebih lanjut, namun kata persetujuan disini dimaksudkan adalah perjanjian. Antara pengertian perjanjian atau persetujuan dengan perikatan oleh banyak sarjana dicampur adukkan, misalnya, Samijo, dalam bukunya "*Pengantar Hukum Indonesia*" menterjemahkan *Verbintenissenrecht* dengan hukum perjanjian berarti disini mereka menyamakan antara perjanjian atau persetujuan dengan perikatan⁴³.

Sekarang timbul pertanyaan dimana letak bedanya? Kalau persetujuan atau perjanjian (*overeenkomst*) merupakan perbuatan hukum (*reehtshandeling*), sedangkan perikatan (*verbintennis*) merupakan hubungan hukum atau perhubungan hukum.⁴⁴ Di samping itu *overeenkomst* mempunyai makna lebih sempit dari pada *verbintennis*, karena persetujuan atau perjanjian (*overeenkomst*) adalah merupakan sumber dari perikatan (*verbintennis*) selain undang-undang hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 1233 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang - undang⁴⁵

⁴³ Samijo, "*Pengantar 1985, Hukum Indonesia*" Penerbit CV. Armico, Bandung, hlm 71

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Soedhary Somim, "*Kitab Undang - Undang Hukum Dagang*", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 313

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut : "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ⁴⁶.

Menurut Abdulkadir Muhammad Pasal 1313 KUHPerdata mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut :⁴⁷

- a. Hanya menyangkut sepihak saja, hal ini diketahui dari perumusan "satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya" kata kerja "mengikatkan" sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak, seharusnya perumusan itu "saling mengikatkan diri" jadi ada konsensus antara pihak – pihak.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus, dalam pengertian "perbuatan" termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus, seharusnya dipakai "persetujuan".
- c. Pengertian perjanjian dalam Pasal tersebut di atas terlalu luas karena mencakup juga pelangsungan padahal yang dimaksud perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ketiga KUHPerdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personil.
- d. Tanpa menyebut tujuan, dalam perumusan Pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Atas dasar alasan-alasan yang dikemukakan diatas maka Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perikatan*" merumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Rumusannya adalah sebagai berikut : "Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih

⁴⁶ Soedhary Somim, "*Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal 328

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, 1990, "*Hukum Perikatan*", Penerbitan Citra Adutya Bakti Bandung, Cetakan II, hlm 20

saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁴⁸

Menurut Subekti, perjanjian adalah Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal⁴⁹. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan untuk melaksanakan apa yang diperjanjikan tersebut.

Berdasarkan perumusan perjanjian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian itu sebagai berikut⁵⁰:

1. Adanya pihak-pihak, sedikit- dikitnya dua pihak
2. Adanya persetujuan antara pihak - pihak terkait
3. Adanya tujuan yang akan dicapai
4. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan.
5. Adanya bentuk tertentu, lisan dan tulisan
6. Adanya syarat - syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Pengertian perjanjian pemborongan dirumuskan dalam Pasal 1601.b KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut "Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan⁵¹

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, 1990, " *Hukum Perikatan*", Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan II, hlm 1

⁴⁹ Subekti, *Op cit*, hlm 140.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op cit*, hlm 79.

⁵¹ Soedhaiyo Soimim, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 382

Terhadap rumusan Pasal 1601.b. KUHPPerdata tersebut Iman Soepomo, kurang sependapat dan beliau mencoba melengkapinya dengan memberikan rumusan sebagai berikut : "Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu pemborong mengikatkan dirinya untuk membuat suatu karya tertentu bagi pihak yang lain yang memborongkan dengan menerima bayaran tertentu dan dimana pihak lain yang memborongkan pekerjaan itu kepada pihak satu, pemborong dengan bayaran tertentu"⁵²

Menurut Subekti perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian yang tidak mempermasalahkan bagaimana cara pemborongannya, rumusan yang diberikan Subekti adalah sebagai berikut : "Perjanjian pemborongan adalah suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan), dengan orang lain (pihak yang menerima pekerjaan), dimana pihak yang pertama menghendaki suatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran uang tertentu sebagai harga borongan"⁵³

Selanjutnya Subekti mengatakan "bagaimana cara pemborongan mengerjakannya tidaklah penting bagi pihak pertama tersebut karena yang dikehendaki adalah hasilnya yang akan diserahkan dalam keadaan baik dalam suatu jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian".

Dari beberapa pengertian mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan maka dapat dikemukakan bahwa pihak yang memborongkan hanya menghendaki suatu hasil pekerjaan yang bersifat materi yaitu dengan memberikan pembayaran sejumlah

⁵² Imam Soepomo, 1979, *"Hukum Perburuhan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan"*, Penerbit Jembatan, hlm 79

⁵³ Subekti, 1977, *"Aneka Perjanjian"*, Alumni, Bandung, hlm 64

harga borongan yang telah ditentukan sebelumnya, bagaimana pihak pemborong mengerjakan tidaklah menjadi soal bagi pihak pemberi kerja (employer). Hal ini bila kita tinjau dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 1601.b KUHPerdara dan pengertian-pengertian yang diberikan oleh para sarjana tersebut, tetapi tidak demikian halnya menurut Keppres Nomor 80 tahun 2003, dimana selama proses pelaksanaan pekerjaan oleh pihak kedua (pemborong) akan selalu diawasi atau dikontrol oleh pihak pertama (pengguna barang). Pasal 1 angka 12 Keppres Nomor 80 tahun 2003 menyatakan "jasa pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa".

Prinsip dasar yang terkandung dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, khususnya pada pasal-pasal yang mengatur mengenai pemborongan adalah bahwa dasarnya perjanjian pemborongan hanya terjadi antara pemberi kerja dalam hal ini Pengguna Barang atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/ Pemborong. Dalam pekerjaan pemborongan berskala besar Pemborong dapat memberikan sebagian pekerjaan pada pihak lain/ Sub Kontraktor tapi harus dengan persetujuan PPK.⁵⁴

Namun menurut hukum tidak ada hubungan hukum antara PPK dengan Sub Kontraktor. Sub Kontraktor hanya mempunyai hubungan dengan

⁵⁴ Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II, bagian D2 huruf e

Pemborong Utama yaitu berdasarkan perjanjian khusus antara Pemborong Utama dengan Sub Kontraktor.⁵⁵

Dalam pekerjaan konsultasi, Penyedia Jasa tidak dibenarkan menyerahkan pekerjaan pada konsultan lain, karena jasa konsultasi adalah jasa profesi yang tidak bisa disubkan pelaksanaan pekerjaannya kepada pihak lain, hal ini akan dicantumkan dalam kontrak seperti berikut :

- a. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh konsultan yang ditunjuk dan dilarang diserahkan kepada pihak lain.
- b. Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dilanggar, maka kontrak konsultan tersebut dibatalkan dan konsultan yang bersangkutan di *black list*.

B. Letak Perjanjian Pemborongan Dalam Hukum Perikatan

Perjanjian pemborongan adalah merupakan bagian tersendiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Didalam hukum perdata, perjanjian pemborongan tergolong pada perjanjian untuk melakukan pekerjaan dan diatur dalam bab yang mengatur tentang perjanjian khusus dalam KUH Perdata.

Dalam KUHPerdata diatur mengenai ketentuan-ketentuan umum dari perjanjian yang berlaku terhadap semua perjanjian, yaitu perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, peraturan-peraturan khusus, maupun perjanjian jenis baru yang belum ada aturannya dalam undang-undang. Sebelum lebih lanjut menguraikan materi sub bab ini yaitu perjanjian pemborongan dalam KUHPerdata lebih dahulu kita lihat pembagian perjanjian untuk melakukan pekerjaan ini menurut

⁵⁵ *Ibid*.

undang-undang. Undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam yakni :

1. Perjanjian untuk melakukan jasa- jasa tertentu
2. Perjanjian kerja / perburuhan
3. Perjanjian pemborongan pekerjaan

Dalam perjanjian macam tipe 1, suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu, biasanya pihak lawan itu adalah orang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia sudah memasang tarif untuk jasa itu, upahnya biasanya dinamakan honorium.

Dalam KUHPdata tidak ada Pasal yang menyebutkan pengertian dari perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu tersebut, cuma dalam Pasal 1601 KUHPdata ada menyinggung tentang perjanjian untuk melakukan jasa-jasa, dalam ketentuan itu dikatakan bahwa persetujuan atau perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu.

Oleh karena perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tersebut diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu (misalnya pengacara dengan kliennya diatur dalam pasal- pasal mengenai perjanjian pemberian kuasa), maka dalam hal ini yang dibicarakan disini hanyalah perjanjian sub 2 dan perjanjian sub 3 yaitu perjanjian perburuhan dan perjanjian pemborongan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan perjanjian kerja/perburuhan adalah perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu hubungan diperatas (*dienstverhouding*) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh yang lainnya.

Tentang pengertian perjanjian pemborongan ini telah diuraikan pada bahagian terdahulu, maka yang menjadi permasalahan di sini adalah dimanakah letak perjanjian ini dalam KUHPerdato. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan tergolong kepada perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang letaknya dalam buku III (tiga) KUHPerdato, khususnya bab VII A bagian pertama dibawah judul "tentang persetujuan - persetujuan untuk melakukan pekerjaan"

Pasal-Pasal yang mengaturnya adalah Pasal 1601.b mengatur tentang pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan, Pasal 1601.c. mengatur tentang unsur-unsur yang menyebabkan diberlakukannya ketentuan-ketentuan perburuhan untuk perjanjian pemborongan, dan bagian keenam dibawah judul tentang pemborongan pekerjaan yaitu Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1616 KUHPerdato yaitu tentang perjanjian pemborongan pada umumnya.

Kalau kita lihat sistematika hukum perdata, maka cara penyusunan atau pembagian aturan-aturan hukum di dalam *Burgerlijke Wetboek* terbagi dalam beberapa buku, pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Buku kesatu, Hukum perorangan dan keluarga yang terdiri dari XVIII bab dan 498 Pasal yaitu mulai dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 498.

2. Buku kedua, Hukum benda didalamnya termasuk pula hukum waris yang terdiri dari XXI bab dan 773 Pasal yaitu mulai dari Pasal 499 sampai dengan Pasal 1232.
3. Buku ketiga, Hukum perikatan yang terdiri dari XVIII bab dan 631 Pasal mulai dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864.
4. Buku keempat Hukum pembuktian dan daluwarsa terdiri dari VII bab dan 128 Pasal mulai dari Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993.

Sementara itu marilah kita lihat pendapat Mariam Darus dalam bukunya "KUHPerdato Buku III tentang hukum perikatan dengan penjelasan" diuraikan bahwa hukum perikatan mulai dari Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456 sedangkan Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1864 adalah mengatur tentang "perjanjian-perjanjian khusus atau perjanjian-perjanjian tertentu" maksudnya adalah macam-macam perjanjian yang ada menurut undang-undang yaitu jual beli, sewa menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian pemberian kuasa dan lain-lain.

C. Ketentuan - Ketentuan Yang Mengatur Perjanjian Pemborongan.

Dalam perundang - undangan di Indonesia mengenai sejumlah peraturan yang bertalian dengan perjanjian pemborongan yang tercantum dalam Kitap Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Undang-Undang Khusus dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Menurut Sri Soedawi Masjchun Sofwan dalam bukunya "Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan", yang dimaksud

dengan hukum bangunan adalah keseluruhan peraturan yang menyangkut pembangunan bangunan.⁵⁶

Selanjutnya beliau mengatakan peraturan-peraturan tersebut dapat digolongkan dalam dua bagian. Bagian pertama menyangkut peraturan-peraturan yang bertalian dengan prosedur pelelangan yaitu ketentuan yang berlaku sebelum terjadinya kontrak. Bagian yang kedua menyangkut peraturan-peraturan mengenai perjanjian.

Bagian peraturan yang menyangkut tentang pelelangan pemborongan atau disebut juga dengan tender, di Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan berlaku bagi perjanjian pemborongan pekerjaan baik mengenai pekerjaan pemerintah maupun swasta yang terjadi melalui pelelangan.

Bagian yang kedua bagian peraturan-peraturan yang menyangkut perjanjian pemborongan didalam hukum perdata perjanjian pemborongan, pekerjaan tergolong pada perjanjian untuk melakukan pekerjaan dan diatur dalam bab yang mengatur perjanjian khusus.

Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) kelompok yaitu :

- a. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁵⁶ Sri Soedewi Masjchun Sofyan, 1982, *"Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan,"* Liberty, Yogyakarta, hlm 3

- b. Ketentuan-ketentuan yang terdapat diluar Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

ad.a. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata seperti : perjanjian pemborongan pekerjaan diatur dalam buku ketiga (III) titel tujuh A (VII A) yaitu Pasal 1601.b. Pasal 1601.c dan Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1616 tentang perjanjian untuk melakukan pekerjaan.

Ketentuan yang terdapat didalam KUHPerdata ini khususnya bagi perjanjian pemborongan pekerjaan hanya berlaku sebagai hukum pelengkap karena ketentuan-ketentuan ini baru berlaku sepanjang tidak ditetapkan oleh para pihak sendiri dalam perjanjian.

Peraturan-peraturan dalam KUHPerdata tersebut pada umumnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban pemborong yang harus diperhatikan baik pada pembuatan perjanjian, mulainya perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan berakhirnya perjanjian, yaitu fase setelah adanya penyerahan pekerjaan

Sedangkan Pasal 1617 KUHPerdata kalau kita lihat dari letak pasal-pasal tersebut memang terletak pada bagian yang mengatur tentang perjanjian pemborongan pekerjaan. Tapi sebenarnya Pasal ini bukanlah merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian, karena pasal ini tidak memenuhi syarat dari apa yang dinamakan perjanjian pemborongan

pekerjaan tersebut. Seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa dalam perjanjian pemborongan pekerjaan itu dimana pihak pertama (yang memborongkan pekerjaan) menghendaki suatu hasil pekerjaan (suatu karya) yang berbentuk materi sedangkan dari rumusan Pasal 1617 KUHPerdato tersebut tidak ada suatu karya yang berbentuk materi yang diciptakan, hanya berbentuk jasa.

Ad.b. Ketentuan-ketentuan yang terdapat diluar Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat diluar KUHPerdato dapat juga dikatakan ketentuan administrasi./ketentuan-ketentuan hukum publik, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa/pemerintah.

Adapun ketentuan-ketentuan / peraturan-peraturan yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

1. *Algemene voonvaarden voor de uitvoaring bij aanneming van openbare werken in Indinesia (A V 1941)* tentang syarat-syarat umum pelaksanaan pekerjaan umum di Indonesia. Perjanjian pemborongan yang juga disebut dengan perjanjian pemborongan pembangunan karena menyangkut dengan pembangunan-pembangunan yang bersifat fisik. Pada asasnya dibuat dalam bentuk tertulis karena selain berguna bagi kepentingan pembuktian juga dengan pengertian bahwa perjanjian pemborongan juga tergolong perjanjian yang mengandung risiko yang menyangkut keselamatan umum dan tertib bangunan dan dalam undang-undang sendiri hanya terdapat ketentuan-ketantuan yang samar saja, oleh karena itu perjanjian pemborongan sering dituangkan dalam bentuk perjanjian standar. Perjanjian standar demikian terbentuk berdasarkan peraturan standar yang berlaku yang menyangkut segi yuridis dan segi teknis, jadi pelaksanaan perjanjian pemborongan selain mengindahkan ketentuan dalam KUHPerdato juga ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan standar. AV 1941 disyahkan dengan Peraturan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 9 Tahun 1941, bijblad Nomor 14571 pada tanggal 28 Mei 1941. AV ini tidak diperlukan dengan mutlak. Akan tetapi hanya diperlakukan sebagai pedoman. Disamping itu

pada dasarnya hal-hal dalam perjanjian telah dimuat dalam surat perjanjian pemborongan (kontrak), kemudian para pihak bebas menentukan apakah akan memperlakukan AV 1941 atau menunjuk peraturan-peraturan lain sebagai pedoman atau peraturan standar.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
4. Undang-undang Nomor 65 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sudah tujuh kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
8. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 257/KPTS/M/2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi. Ketentuan-ketentuan yang ini memuat tiga aspek yang harus selalu diperhatikan dalam pengadaan yaitu :
 - a.. Diperoleh harga yang paling menguntungkan Negara dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Diperoleh barang dan jasa dengan kualitas menurut persyaratan teknis yang diperlukan.
 - c. Dipergunakan barang dan jasa hasil produksi dalam Negeri.
9. Peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan hukum bangunan seperti:
 - a. Peraturan beton bertulang di Indonesia (PBI-1971)
 - b. Peraturan umum penelitian barang - barang bangunan (PUPBB)
 - c. Peraturan umum instalasi listrik.

D. Syarat - Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang sehingga diakui secara hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh yang bersangkutan, karena itu selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, walaupun tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian itu berlaku antara pihak-pihak, apabila

sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya maka hukum akan membatalkannya atau perjanjian itu batal demi hukum.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi maka hukum membatalkannya atau menyatakan perjanjian itu batal demi hukum. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara adalah merupakan dasar bagi para pihak untuk mengadakan perjanjian seperti tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlakukan 4 (empat) syarat yakni :

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal"

Berdasarkan keempat syarat tersebut di atas, syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena mengenai orang-orang/subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objeknya dari perbuatan hukum yang dilakukan, dan syarat tersebut adalah bersifat mutlak atau harus dipenuhi semuanya artinya bila salah satu diantara keempat syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian yang dibuat adalah batal demi hukum.

Dari ke 4 (empat) syarat-syarat syahnya perjanjian tersebut diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sepakat Orang Yang Mengikatkan Diri

Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri bahwa kedua subjek yang menggunakan perjanjian harus besepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang telah diadakan. Kesepakatan itu harus dinyatakan dengan persyaratan secara logis dan diam-diam telah terjadi suatu perjanjian yang meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak sedangkan kesepakatan yang terjadi secara tegas, misalnya perjanjian jual beli yang menghendaki sesuatu secara timbal balik, yang menjual menghendaki uang sipembeli dan sipembeli menghendaki barang si penjual.

Kemudian kemauan bebas sebagai syarat-syarat pertama untuk syahnya suatu perjanjian dianggap tidak ada jika perjanjian yang dibuat itu telah terjadi karena adanya suatu paksaan, kekhilafan, suatu perjanjian yang telah terjadi karena paksaan dimana salah satu pihak merasa takut karena ancaman misalnya akan dianiaya kalau tidak menyetujui suatu perjanjian sehingga dengan demikian terpaksa menyetujui perjanjian itu.

Selain itu suatu perjanjian yang terjadi karena penipuan dapat pula terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar disertai dengan akal cerdas sehingga pihak lain terbujuk untuk memberikan perizinannya. Jadi untuk jelasnya adanya kesepakatan kedua belah pihak itu benar-benar dapat diberikan oleh kedua belah pihak tadi.

2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Pada hakekatnya setiap orang dewasa yang sehat pikirannya adalah cakap untuk bertindak dalam hukum akan tetapi dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebutkan pula adanya orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, mereka itu adalah :

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang dilarang membuat perjanjian tertentu

Jika terjadi salah satu tersebut diatas yaitu perjanjian yang dibuat salah satu pihak tidak cakap untuk membuat perjanjian maka perjanjian itu bercacat karenanya maka dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang telah membuat perjanjian. Adanya beberapa golongan orang dilarang oleh undang-undang membuat perjanjian adalah memenuhi suatu pertimbangan keadilan karena mereka yang membuat perjanjian adalah terikat oleh perjanjian itu dan bertanggung jawab sepenuhnya, karena itu mereka harus sadar dan mampu memikul akibat perjanjian itu dan sering kali perjanjian itu melibatkan harta kekayaan karena dituntut mereka mampu dan cakap berbuat bebas terhadap harta kekayaan.

Menurut KUHPerdara seorang perempuan yang bersuami untuk mengadakan suatu perjanjian memerlukan bantuan dan atau harus seizin suaminya (Pasal 108 KUHPerdara). Untuk perjanjian mengenai soal-soal

kecil yang dapat dimasukan kedalam keperluan rumah tangga dianggap sang istri telah dikuasakan oleh suaminya, dengan demikian seorang istri dimasukan kedalam golongan orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian, maka perbedaannya dengan anak yang belum dewasa ialah bahwa seorang anak yang belum dewasa harus diwakili oleh walinya sedangkan si istri dibantu oleh suaminya.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 108 KUHPerdara dalam suasana saat ini sudah tidak sesuai lagi hal ini sejalan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/1963 pada tanggal 4 Agustus 1963 yang mengintruksikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri diseluruh Republik Indonesia bahwa "Ketentuan Yang Terdapat dalam Pasal 108 KUHPerdara dan Pasal 110 KUHPerdara tentang wewenang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin dan bantuan dari suami sudah dianggap tidak berlaku lagi"

3. Suatu Hal Tertentu

Perjanjian yang dibuat para pihak yang mengadakan perjanjian adalah suatu hal yang tertentu cukup jelas syarat ini perlu untuk menetapkan hak dan kewajiban pada hal jika seandainya timbul perselisihan barang yang dimaksud dalam perjanjian harus ditetapkan jenisnya, bahwa barang tersebut sudah ada atau sudah berada ditangan si berhutang pada waktu perjanjian itu dibuat. Suatu hal tertentu ini adalah objek dari perjanjian dengan kata lain ialah prestasinya yaitu segala sesuatu yang merupakan hak dari kreditur dan menjadi kewajiban bagi debitur. Yang dapat

dijadikan objek dari perjanjian diantaranya :(1) benda, (2) prestasi, benda dan prestasi adalah objek dari perjanjian karena dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak misalnya dalam perjanjian jual beli dimana pihak pembeli sebelum mengambil barang terlebih dahulu memberikan uang dan pihak penjual setelah menerima uang lalu menyerahkan barang yang dibeli oleh pembeli itu.

4. Suatu Sebab Yang Halal

Suatu sebab yang halal itu bukanlah dalam arti yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.

Selanjutnya Saheroji menjelaskan bahwa pengertian dari pada sebab/causa adalah Sebagian isi dan tujuan dari suatu perjanjian yang menyebabkan adanya perjanjian itu, maka perjanjian tanpa suatu sebab/causa adalah tidak mungkin.⁵⁷ Kemudian di dalam Pasal 1335 KUHPerdata dijelaskan pula bahwa "Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan".

Clausula yang dibuat dalam suatu perjanjian dianggap bertentangan dengan undang-undang misalnya dimana satu pihak berjanji untuk menyanggupi akan melakukan suatu kejahatan, sedangkan suatu causa

⁵⁷ Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Aksara Baru, Jakarta, hlm 120.

yang dianggap bertentangan dengan kesusilaan, misalnya satu pihak harus meninggalkan suatu agama untuk memeluk agama lain dalam hal ini perjanjian harus dianggap dari semula sudah batal demi hukum dan hakim berkuasa karena jabatannya mengucapkan pembatalan meskipun tidak diminta oleh salah satu pihak

E. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Ketentuan mengenai kontrak yang terdapat dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

1. Isi Kontrak

Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan dan alamat;
- b. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
- c. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat didalam perjanjian;
- d. Nilai harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
- e. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas terinci;
- f. Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pastiserta syarat-syarat penyerahannya;
- g. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
- h. Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- i. Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
- j. Ketentuan mengenai keadaan memaksa;
- k. Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- l. Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
- m. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
- n. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisian.

2. Jenis Kontrak

Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dibedakan atas :

- a. Kontrak lump sum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang.
- b. Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
- c. Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam suatu pekerjaan yang diperjanjikan.
- d. Kontrak terima jadi adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang ditetapkan.
- e. Kontrak persentase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultasi di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang

bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/pemborongan tersebut.

- f. Kontrak tahun tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
- g. Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai oleh APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten/Kota.
- h. Kontrak pengadaan tunggal adalah kontrak antara satu unit kerja atau satu proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.
- i. Kontrak pengadaan bersama adalah kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kegiatan bersama yang jelas dan masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.

F. Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Publik di Indonesia⁵⁸

1. Perkembangan Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa dimulai sejak adanya pasar dimana orang dapat membeli dan atau menjual barang. Cara atau metode yang digunakan dalam jual beli barang di pasar adalah dengan cara tawar menawar secara langsung antara *pihak pembeli* atau *pihak pengguna* dengan *pihak penjual* atau *pihak penyedia barang*. Apabila dalam proses tawar-menawar telah tercapai kesepakatan harga, maka dilanjutkan dengan transaksi jual beli, yaitu pihak penyedia barang menyerahkan barang kepada pihak pengguna dan pihak pengguna membayar berdasarkan harga yang disepakati kepada pihak penyedia barang. Proses tawar-menawar dan proses transaksi jual beli dilakukan secara langsung tanpa didukung dengan dokumen pembelian maupun dokumen pembayaran dan penerimaan barang.

Apabila barang yang akan dibeli jumlah dan jenisnya banyak, dan setiap jenis barang tersebut dilakukan tawar-menawar, maka akan memakan waktu. Untuk menghemat waktu, pengguna menyusun secara tertulis jenis dan jumlah barang yang akan dibeli, selanjutnya diberikan kepada penyedia barang untuk mengajukan penawaran secara tertulis pula. Daftar barang yang disusun secara tertulis tersebut kiranya yang menjadi *asal-usul dokumen pembelian*. Sedangkan penawaran harga yang dibuat secara tertulis merupakan *asal usul dokumen penawaran*.

⁵⁸ Budihardjo Hardjowiyono dan Hayie Muhammad, *Prinsip-prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Indonesia Procurement Watch, Jakarta:2006, hlm 1-5

Perkembangan selanjutnya pihak pengguna menyampaikan daftar barang yang akan dibeli tidak hanya kepada satu tetapi kepada beberapa penyedia barang. Dengan meminta penawaran kepada beberapa penyedia barang, pengguna dapat memilih harga penawaran yang paling murah dari setiap jenis barang yang akan dibeli. Cara tersebut kiranya yang menjadi cikal-bakal *pengadaan barang dengan cara lelang*.

Cara pembelian barang berkembang tidak terbatas pada pembelian barang yang telah ada di pasar saja tetapi juga pembelian barang yang belum tersedia di pasar. Pembelian barang yang belum ada di pasar dilakukan dengan cara *pesanan*. Agar barang yang dipesan dapat dibuat seperti yang diinginkan, maka pihak pemesan menyusun nama, jenis, jumlah barang yang dipesan beserta spesifikasinya secara tertulis dan menyerahkannya kepada pihak penyedia barang. Dokumen tertulis tersebut dinamakan *dokumen pemesanan barang* yang kiranya menjadi asal-usul dari *dokumen lelang*.

Pengadaan barang dengan cara pemesanan tidak terbatas pesanan barang yang bergerak seperti rumah, gedung, jembatan, bendungan dan lain-lainya. Untuk pemesanan barang berupa bangunan, pihak pengguna biasanya menyediakan gambar rencana atau gambar teknis dari bangunan yang dipesan. Pemesanan atau pengadaan barang berupa bangunan tersebut merupakan asal-usul *pengadaan pekerjaan pemborongan* yang kemudian disebut *pengadaan jasa pemborongan*.

Sekarang pengadaan barang tidak terbatas pada barang yang berwujud tetapi juga barang yang tidak berwujud. Barang tidak berwujud umumnya adalah jasa. Misalnya jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan pendidikan, jasa konsultasi, jasa supervisi, jasa manajemen, dan lain-lainnya. Pengadaan barang tak berwujud yang umumnya berupa jasa tersebut merupakan asal usul *pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya*.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya perubahan dan kemajuan dalam semua bidang kegiatan, termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa. Apabila pada tahap awal pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan jual beli langsung di suatu tempat (pasar), sekarang pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara tidak langsung. Yang sekarang sedang berkembang pengadaan barang melalui media teknologi informasi (misalnya : melalui internet) dan dapat dilakukan dan berlaku dimana saja. Pengadaan barang dan jasa yang pada awalnya merupakan kegiatan praktis, sekarang sudah menjadi pengetahuan yang dapat dipelajari dan diajarkan.

2. Hakekat dan Filosofi Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu untuk dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya

Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa,

tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.

Berdasarkan uraian dan pengertian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa filosofi pengadaan barang dan jasa adalah upaya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.

3. Etika Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pihak pengguna dan pihak penyedia yang mempunyai kehendak atau kepentingan yang berbeda bahkan dapat dikatakan bertentangan. Pihak pengguna menghendaki memperoleh barang dan jasa dengan harga semurah-murahnya, sedangkan pihak penyedia ingin mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Dua kehendak atau keinginan yang bertentangan tersebut akan sulit dipertemukan kalau tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Untuk itu perlu adanya etika dan norma yang disepakati dan dipatuhi bersama.

Adapun etika dalam pengadaan barang dan jasa adalah perilaku yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Yang dimaksud perilaku yang baik adalah perilaku untuk saling menghormati terhadap tugas, dan fungsi masing-masing pihak, bertindak secara profesional dan tidak saling mempengaruhi untuk maksud tercela atau untuk

kepentingan/keuntungan pribadi dan atau kelompok dengan merugikan pihak lain. Perbuatan yang tidak patut dilakukan dan sangat bertentangan dengan etika pengadaan adalah salah satu pihak atau secara bersama-sama melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 (Pasal 2 ayat (1)) adalah “setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, terkandung pengertian keuangan atau kekayaan milik pemerintah atau swasta maupun masyarakat. Kolusi adalah tindakan tercela yang dilakukan dengan kerjasama untuk melakukan korupsi sehingga merugikan pihak lain. Sedangkan nepotisme adalah tindakan tercela yang menyalahgunakan hubungan kekerabatan, perkoncoan untuk maksud melakukan tindak korupsi.

Pengadaan barang dan jasa dapat menjadi titik rawan terjadinya praktek KKN, oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Upaya tersebut diantaranya dapat dilakukan dengan penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan, meningkatkan profesionalisme para pelaku pengadaan, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum.

4. Norma Pengadaan Barang dan Jasa

Agar tujuan pengadaan barang dan jasa dapat tercapai dengan baik, maka semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus mengikuti norma yang berlaku. Suatu norma itu baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang, oleh karena norma itu pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain atau terhadap lingkungannya. Sebagaimana norma lain yang berlaku, norma pengadaan barang dan jasa terdiri dari norma yang tidak tertulis dan norma yang tertulis. Norma yang tidak tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat ideal, sedangkan yang tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat operasional. Norma ideal pengadaan barang dan jasa antara lain yang tersirat atau pengertian tentang hakekat, filosofi, etika, profesionalisme dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Sedangkan norma pengadaan barang dan jasa yang sifatnya operasional pada umumnya telah dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu berupa undang-undang, peraturan, pedoman, petunjuk dan bentuk produk statuter lainnya.

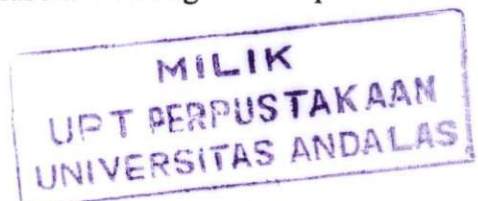
5. Para Pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa melibatkan dua pihak, yaitu Pihak Pembeli atau Pengguna yang dalam Perpres nomor 8 tahun 2006 disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pihak Penjual atau Penyedia Barang dan Jasa. Pembeli atau Pengguna Barang dan Jasa adalah pihak yang membutuhkan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan, pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuat

barang atau melaksanakan pekerjaan tertentu. Pengguna barang dan jasa dapat merupakan suatu lembaga/organisasi dan dapat pula orang perseorangan. Yang tergolong lembaga antara lain: Instansi pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota), badan usaha (BUMN, BUMD, Swasta), dan organisasi masyarakat. Sedangkan yang tergolong orang perseorangan adalah individu atau orang yang membutuhkan barang dan jasa.

Untuk membantu pengguna dalam melaksanakan pengadaan dapat dibentuk Panitia Pengadaan, Lingkup tugas panitia dapat melaksanakan seluruh proses pengadaan mulai dari penyusunan dokumen pengadaan, penyeleksi dan memilih para calon penyedia barang dan jasa, meminta penawaran dan mengevaluasi penawaran, mengusulkan calon penyedia barang dan jasa dan membantu pengguna dalam menyiapkan dokumen kontrak, atau sebagian dari tugas tersebut.

Pengguna yang kurang memahami seluk beluk pengadaan dan atau kurang mengetahui detail teknis barang dan jasa yang akan diadakan meminta bantuan kepada pihak ketiga atau kepada para ahli yang memahami baik dari segi teknis maupun seluk beluk pengadaan yang diinginkan. Penyedia barang dan jasa adalah pihak yang melaksanakan pemasokan atau mewujudkan barang atau melaksanakan pekerjaan atau melaksanakan layanan jasa berdasarkan permintaan atau perintah resmi atau kontrak pekerjaan dari pihak pengguna. Penyedia barang dan jasa dapat merupakan badan usaha, atau orang perseorangan. Penyedia yang bergerak dalam bidang pemasokan barang disebut pemasok atau



leveransir, bidang jasa pemborongan disebut pemborong atau kontraktor, dan bidang jasa konsultasi disebut konsultan.

6. Sumber Pembiayaan Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber pembiayaan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah berasal dari dana APBN untuk pengadaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah pusat, APBD untuk pengadaan yang dilaksanakan oleh pemerintah propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan anggaran BUMN+APBN untuk pengadaan yang dilakukan oleh BUMN atau anggaran BUMD+APBD untuk pengadaaan yang dilakukan oleh BUMD. Sumber dana tersebut di atas berasal dari pendapatan dalam negeri (rupiah murni) dan atau pinjaman/hibah luar negeri.

Penggunaan dana APBN, APBD, BUMN, dan BUMD untuk pengadaan barang dan jasa diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Perundang-undangan dan menggunakan dana pinjaman/hibah luar negeri diatur oleh pemberi pinjaman/hibah yang dituangkan dalam perjanjian/hibah. Penggunaan dana APBN untuk pengadaaan barang dan jasa diatur melalui Keppres No. 80 Tahun 2003. Penggunaan dana APBD untuk pengadaan dan jasa diatur melalui Perda berdasarkan PP No. 105 tahun 2000 pasal 14 dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan di atasnya. Penggunaan dana BUMN, BUMD untuk pengadaan barang dan jasa diatur melalui PP No. 12 dan 13 Tahun 1996. Pengadaan barang dan jasa dengan dana pinjaman / hibah luar negeri menggunakan ketentuan yang tercantum dalam masing-masing naskah pinjaman/hibah luar negeri.

G. Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen diartikan sebagai suatu kegiatan pengamatan dan penilaian secara berkesinambungan terhadap suatu obyek kegiatan dengan menggunakan metode dan aturan tertentu untuk menjamin pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Pengawasan pengadaan barang dan jasa adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan maksud agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana, prinsip dasar pengadaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Hakekat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan kegagalan serta agar pengadaan dilaksanakan secara efisien, efektif, hemat dan tertib.

Pengawasan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah merupakan tanggung jawab seluruh pimpinan dalam instansi Pemerintah yang terkait dengan pengadaan.

a. Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa

1). Obyek Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa

Obyek Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa instansi pemerintah pada dasarnya meliputi dua aspek yaitu aspek keuangan dan aspek pelaksanaan pengadaan.

Pengawasan terhadap aspek keuangan meliputi administrasi umum (seperti laporan keuangan dan laporan perpajakan) dan pelaksanaan anggaran (seperti pertanggungjawaban fisik dan keuangan, penyampaian laporan realisasi anggaran, penyelenggaraan pembukuan). Pengawasan terhadap aspek keuangan ditujukan agar pengguna uang/dana/anggaran dalam rangka barang

dan jasa sesuai dengan tujuan serta aturan penggunaan anggaran tersebut, sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan dan kebocoran keuangan negara.

Pengawasan terhadap aspek pelaksanaan meliputi prosedur pelelangan, prosedur evaluasi penawaran, pelaksanaan prekualifikasi, penyusunan dan pembuatan perjanjian/kontrak, pengendalian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, penyusunan kerangka acuan kerja, penetapan dan pengesahan harga perkiraan sendiri.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan dimaksudkan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan efektif, efisien, transparan, tidak diskriminatif, persaingan sehat, serta bertanggungjawab, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan praktek KKN yang merugikan masyarakat dan negara.

2). Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan pengawasan pangadaan barang dan jasa pada dasarnya dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

Pengawasan internal dilakukan oleh unit pengawasan intern pada instansi Pemerintah (**pengawasan fungsional/ Wasnal**) yang disertai tugas untuk melakukan pengawasan seperti Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Departemen, satuan Pengawasan Intern pada BUMN/BUMD, dan unit pengawasan pada Pemerintah Daerah. Selain itu, pengawasan internal dapat dilakukan

pengawasan melekat (waskat) oleh atasan langsung terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di institusinya, dan atau pengawasan yang dilakukan oleh setiap pejabat yang terkait yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pengawasan internal tersebut dimaksudkan untuk mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi masing-masing, serta menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan.

Pengawasan eksternal dilakukan oleh pengawas diluar instansi pemerintah yang bersangkutan yang diberikan tugas untuk mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan institusi Pemerintah, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selain itu pengawasan eksternal dapat pula dilakukan oleh suatu lembaga pengawas yang independen, lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas. Pengawasan eksternal tersebut dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah sesuai dengan tugas dan wewenangnya ataupun karena ada suatu kasus tertentu yang mengharuskan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas independen. Selain itu pengawasan eksternal dimaksudkan pula untuk menindaklanjuti penyimpangan dan atau pelanggaran yang terjadi.

b. Tindak Lanjut Pengawasan

Berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003, hasil pengawasan wajib ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi kepada yang berbuat kesalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ketentuan tersebut antara lain menyatakan, bahwa:

Kepada para pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa termasuk penyedia atau pengguna barang dan jasa yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan dikenakan sanksi;

Sanksi bagi pengguna yang melakukan kesalahan dapat berupa tindakan administrasi, tuntutan ganti rugi, atau diproses melalui gugatan perdata, pengaduan tindak pidana. Bagi penyedia barang/jasa yang bersalah dapat dikenakan sanksi administrasi, misalnya dikenakan sanksi tidak diikutsertakan dalam pengadaan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu atau dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cara untuk memilih penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang akan diadakan disebut metode pengadaan barang/jasa. Metode pengadaan jasa pemborongan objeknya nyata, baik kualitas maupun kuantitasnya, bisa diukur, sehingga harganya bisa dikalkulasi/dihitung. Dengan demikian dalam pengadaan jasa pemborongan yang dipersaingkan adalah penawaran harganya. Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode lelang, pemilihan langsung atau penunjukan langsung. Metode lelang adalah paling tepat digunakan dalam pengadaan barang/jasa. Namun demikian untuk hal yang sifatnya spesifik, metode pemilihan langsung atau penunjukan langsung dapat digunakan.

Pengadaan barang/jasa dengan metode pelelangan umum adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan cara membandingkan diantara penawaran-penawaran dari calon penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan. Metode pelelangan umum adalah metode yang paling banyak digunakan dalam pengadaan barang/jasa. Metode ini dipilih karena akan mendapat/menjaring calon penyedia barang/jasa sebanyak-banyaknya, sehingga akan terjadi persaingan yang luas diantara calon penyedia barang/jasa. Agar dapat memperoleh atau menjaring calon peserta sebanyak-banyaknya, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus diumumkan secara luas dan terbuka bagi semua penyedia barang/jasa yang berminat dan memenuhi syarat.

Proses pengadaan barang di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat menurut Sri Martuti, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat singkatnya diawali dengan membuat perencanaan setiap awal tahun yang disebut

dengan Usulan Pra DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) untuk pengadaan tahun berikutnya. Perencanaan tersebut lengkap dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kalau untuk kontruksi/bangunan, baik rehab maupun bangunan baru harus dilengkapi dengan gambar disainnya. Usulan Pra DIPA tersebut paling lambat pada awal bulan Mei dikirim ke Departemen Hukum dan HAM Jakarta untuk dievaluasi dan selanjutnya akan diajukan ke Departemen Keuangan dan dibahas di DPR untuk dimasukkan ke APBN. Setelah disetujui maka diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diserahkan pada tanggal 2 Januari oleh Gubernur kepada Kakanwil. Setelah DIPA diterima maka ditindaklanjuti dengan membuat program pelaksanaannya yang diawali dengan penunjukan Tim/Panitia Pelaksananya. Untuk pengadaan bangunan baru gedung atau rehab/renovasi tahap selanjutnya melakukan penunjukan Konsultan Perencana untuk membuat dokumen pengadaan/dokumen lelang. Setelah selesai dokumen tersebut maka dilaksanakan proses pengadaan Penyedia Barang/Pemborong sesuai Keppres Nomor .80 tahun 2003. Setelah Pemborong ditentukan maka pekerjaan pembangunan fisik segera dimulai. Setelah pekerjaan pemborongan selesai, Pemborong menyerahkan hasil pekerjaan tersebut pada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pemilik bangunan⁶¹.

Proses penyusunan DIPA Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut⁶² :

Masing-masing Satuan Kerja atau Unit Pelaksana Teknis pada bulan Januari dan Pebruari membuat program pembangunan dan rincian anggaran yang dituangkan

⁶¹ Wawancara tanggal 23 Juli 2008.

⁶² Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM Nomor: SEK.PR.01.03-10 tanggal 13 Maret 2008 perihal Penyusunan RAPBN dan RKA-KL 2009 secara terpadu.

dalam konsep Rencana Kerja dan anggaran Departemen/Lembaga (RKA-KL) yang biasa disebut Pra DIPA, lalu dikirim ke Kantor Wilayah. Program tersebut meliputi:

1. Belanja Pegawai, yang meliputi gaji, tunjangan, uang makan PNS, honor, uang lembur dll.
2. Belanja Barang yang meliputi belanja pemeliharaan (pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, taman, kendaraan dinas serta sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan) belanja perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan, belanja barang/jasa (keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai, penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa dan lain-lain)
3. Belanja Modal, yang meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan.

Pada bulan Maret diadakan Rapat Koordinasi di Kantor Wilayah untuk pemantapan usulan dan melakukan penyusunan RKA-KL. Paling lambat pada awal bulan Mei usulan tersebut sudah dikirim ke Departemen Hukum dan HAM. Usulan rencana kerja dan anggaran tersebut harus dilengkapi dengan data pendukung seperti: Standar Biaya Umum setempat, RAB dengan diketahui oleh pejabat/instansi yang berwenang, Ambang Batas Kerusakan (untuk kegiatan rehabilitasi gedung negara) dengan diketahui oleh pejabat/instansi yang berwenang, Gambar Pra Rencana dan data lain yang mendukung perhitungan dalam RKA-KL. Adapun contoh proses penyusunan DIPA tahun 2009 tingkat Pusat dijadwalkan seperti tabel berikut :⁶³

⁶³ *Ibid.*

Tabel 1. Jadwal Penyusunan DIPA Departemen Hukum dan HAM

NO	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Penyampaian rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Pebruari 2008	Rencana awal RKP dijadikan dasar penyusunan awal Renja K/L (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga)
2	Sidang kabinet Paripurna	Maret 2008	Arahan Presiden, penjelasan Men.Keu dan Meneg.PPN/Kepala Bappenas tentang Rancangan awal RKP tahun 2009
3	Penyampaian Pagu Indikatif tahun 2009	Maret 2008	Disampaikan kepada K/L dengan SEB Men.Keu dan Meneg.PPN/Kepala Bappenas sebagai ancar-ancar K/L untuk menyempurnakan rancangan awal RKP. Ditentukan berdasarkan pagu tahun 2008 penyerapan anggaran 2008 dan prioritas nasional tahun 2009
4	K/L menyampaikan Rencana Kerja sesuai dengan pagu Indikatif yang dibahas antara K/L, Bappenas dan Depkeu	Maret-April 2008	Hasil bahasan berupa penyempurnaan rancangan awal RKP dan pagu Indikatif dengan usulan perubahan/pergeseran dan tambahan kegiatan dan alokasi anggaran. Usulan penambahan anggaran merupakan catatan dan pembahasan
5	Rapat koordinasi di Wilayah masing-masing dalam rangka Penyusunan RKA-KL 2009	Maret-April 2008	Penentuan Rencana Kerja yang telah akan dimuat dalam Rencana RKA-KL 2009
6	Penyempurnaan RENJA K/L	Juni 2008	Renja K/L disempurnakan dengan masukan-masukan dari wilayah sebagaimana telah tersusun dalam rencana kerja dan anggaran wilayah
7	Pengendalian, monitoring dan penajaman setjen dan Unit Utama	Juni 2008	Menyesuaikan rencana kerja yang telah disusun dengan kondisi riil di Satker masing-masing
8	Rapat konsultasi teknis RKA-K/L	Juni 2008	Finalisasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2009
9	Penyerpurnaan RKP dan Pagu Indikatif dibahas bersama Panitia Anggaran DPR-RI oleh Depkeu dan Bappenas	Juni 2008	Hasil pembahasan berupa Pagu Sementara yang disampaikan kepada K/L oleh Depkeu
10	Rapat Koordinasi Rencana Kerja Tahunan Dep.Hukum dan HAM	Juni 2008	Pembahasan penyempurnaan Renja K/L dan penyusunan RKA-KL sesuai dengan Pagu Sementara K/L
11	Penyampaian Pagu Sementara K/L	Juli 2008	SE Menteri Keuangan
12	K/L menyusun rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) berdasarkan Pagu sementara	Mei-Agustus 2008	RKA-KL disampaikan kepada depkeu dan Bappenas sebagai lampiran RAPBN tahun 2009
13	RKA-KL disampaikan kepada DPR	Mei-Agustus 2008	Persetujuan DPR atas RKA-KL disampaikan Menkeu untuk ditelaah bersama-sama K/L

a. Perencanaan Pengadaan

Perencanaan pengadaan dilakukan setelah DIPA dan RKA-KL diterima. Perencanaan Pengadaan meliputi rangkaian kegiatan pemaketan pekerjaan, penyusunan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan penyediaan biaya proses pengadaan.

Pembuatan jadwal pelaksanaan disusun sesuai dengan waktu yang diperlukan serta dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran. Jadwal pelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan pemilihan penyedia jasa pemborongan, waktu mulai dan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dan waktu serah terima akhir pekerjaan.

Pengguna jasa wajib menyediakan biaya yang diperlukan untuk proses pengadaan. Komponen biaya pengadaan tersebut antara lain⁶⁵ :

- 1) Biaya pengumuman yaitu biaya untuk pemasangan iklan di surat kabar dan di media elektronik.
- 2) Biaya penyediaan dokumen pengadaan yaitu biaya untuk menyusun dan menggandakan dokumen pengadaan.
- 3) Biaya perjalanan yaitu biaya untuk perjalanan dalam rangka penyusunan dokumen dan pelaksanaan pengadaan.
- 4) Biaya kantor seperti untuk belanja alat tulis serta biaya rapat-rapat dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pengadaan.

Adapun Kantor Wilayah pada tahun anggaran 2006 dan 2007 telah menentukan paket-paket kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana seperti dalam tabel berikut :

⁶⁵ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 8

Tabel 2 Paket-paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana TA 2006-2007

No	BANGUNAN	KEGIATAN	BIAYA (RP)	PAKET	BIAYA (RP)	KET.
1	Kantor	Pembangunan gedung dua lantai	1.815.000.000	Pemb.gedung dua lantai	1.815.000.000	1 paket
2	Rumah Dinas Air Tawar, 1 unit	-Rehab Rumah -Rehab Pagar -Saluran Keliling - Penimbunan Halaman	84.600.000 4.092.000 3.315.000 37.500.000	-Rehab rumah - Rehab pagar saluran keliling dan penimbunan halaman	84.600.000 44.907.000	2 paket
3	Rumah dinas Parupuk, 2 unit	- Rehab Rumah - Rehab Pagar	82.273.000 15.435.000	Rehab rumah dan pagar	97.708.000	1 paket
4	Rumah Dinas Gurun Laweh, 1 unit	-Rehab Rumah -Rehab Pagar -Saluran Keliling	41.125.000 3.150.000 2.975.000	Rehab rumah, pagar dan saluran keliling	47.240.000	1 paket
5	Rumah Dinas Kakanwil, 1 unit	Renovasi Rumah	425.859.000	Renovasi rumah	425.859.000	1 paket
6	Kantor	Penimbunan halaman, perbaikan saluran dan pemasangan pavin blok	93.230.000	Penimbunan halaman, perbaikan saluran dan pemasangan pavin blok	93.230.000	1 paket

Sumber : Diolah dari dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat tahun 2006-2007

b. Pembentukan Panitia Pengadaan

Panitia Pengadaan atau Panitia Lelang adalah lembaga pelaksana yang pertama-tama dibentuk dan ditunjuk oleh PPK. Panitia berjumlah gasal yang pada kegiatan Pembinaan Sarana dan Prasarana Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat Tahun 2006 dan 2007

ditunjuk 5 (lima) orang anggota, yang terdiri dari empat orang Pejabat/staf pada Bagian Umum dan satu orang dari pengelola teknis Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Wilayah Propinsi Sumatera Barat.

Adapun tugas panitia adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- 2) Menyusun dan menyiapkan HPS;
- 3) Menyiapkan dokumen pengadaan;
- 4) Mengumumkan pengadaan dengan metode Pelelangan Umum melalui surat kabar nasional dan propinsi serta pada papan pengumuman;
- 5) Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi;
- 6) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- 7) Mengusulkan calon pemenang;
- 8) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK;
- 9) Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan dimulai.

c. Penetapan Sistem Pengadaan

Dengan mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada, PPK bersama dengan panitia pengadaan, terlebih dahulu harus menetapkan metode pemilihan penyedia barang/jasa, metode penyampaian dokumen penawaran, metode evaluasi penawaran dan jenis kontrak yang paling tepat atau cocok dengan barang/jasa yang bersangkutan.

Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah cara untuk memilih penyedia barang yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa yang akan diadakan.

Dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 17 menentukan metode pemilihan penyedia barang/jasa adalah sebagai berikut :

a) Metode Pelelangan Umum

Metode inilah yang merupakan prinsip utama pengadaan barang/jasa, yaitu dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui surat kabar nasional dan/atau propinsi dan papan pengumuman resmi intitusi. Biasa dilakukan untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b) Metode Pelelangan Terbatas

Metode ini dipakai untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas. Sistem pengumumannya sama dengan pelelangan umum.

c) Metode Pemilihan Langsung

Merupakan metode pemilhan yang membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi. Metode ini cukup diumumkan melalui papan pengumuman institusi atau bila memungkinkan melalui internet. Metode ini dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

d) Metode Penunjukan Langsung

Metode ini langsung menunjuk 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi teknis maupun harga. Metode ini dapat digunakan dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, termasuk apabila nilai pekerjaan dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan Bangunan pada Kantor Wilayah Tahun anggaran 2006 dan 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Metode Pemilihan Penyedia Jasa Pemborongan TA 2006-2007

No	BANGUNAN	KEGIATAN	BIAYA (RP)	PAKET	BIAYA (RP)	METODE PEMILIHAN
1	Kantor	Pembangunan gedung dua lantai	1.815.000.000	Pemb.g edung dua lantai	1.815.000.000	Pelelangan Umum
2	Rumah Dinas Air Tawar, 1 unit	-Rehab Rumah -Rehab Pagar -Saluran Keliling -Penimbunan Halaman	84.600.000 4.092.000 3.315.000 37.500.000	-Rehab rumh -Rehab pagar saluran keliling dan penimbunan halaman	84.600.000 44.907.000	-Pemilihan Langsung - Penunjukan Langsung
3	Rumah dinas Parupuk, 2 unit	-Rehab Rumah - Rehab Pagar	82.273.000 15.435.000	Rehab rumah dan pagar	97.708.000	Pemilihan Langsung
4	Rumah Dinas Gurun Laweh, 1 unit	-Rehab Rumah -Rehab Pagar -Saluran Keliling	41.125.000 3.150.000 2.975.000	Rehab rumah, pagar dan saluran keliling	47.240.000	Penunjukan Langsung
5	Rumah Dinas Kakanwil, 1 unit	Renovasi Rumah	425.859.000	Renovasi rumah	425.859.000	Pelelangan Umum
6	Kantor	Penimbunan halaman, perbaikan saluran dan pemasangan pavin blok	93.230.000	Penimbunan halaman , perbaikan saluran dan pemasangan pavin blok	93.230.000	Pemilihan Langsung

Sumber : Diolah dari dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat tahun 2006-2007

Kalau dicermati tabel diatas terlihat tidak konsistennya Kuasa Pengguna Anggaran dan Panitia dalam menentukan paket Pekerjaan.

Pekerjaan rehab rumah dinas Air Tawar dan rumah dinas Parupuk serta Gurun Laweh sama-sama mempunyai kegiatan Rehab rumah dan Lingkungan tetapi pada pekerjaan rumah dinas Air Tawar dijadikan dua paket sedangkan pada rumah dinas Parupuk dan Gurun Laweh, pekerjaan rehab rumah dijadikan satu paket dengan pekerjaan Lingkungan (pagar dan halaman). Dengan demikian terkesan bahwa penentuan pekerjaan dinas Air Tawar menjadi dua paket adalah untuk menghindari Pelelangan Umum, walaupun pemecahan paket ini dibolehkan.

Metode Penyampaian Penawaran adalah cara bagaimana penyedia barang/jasa menyampaikan dokumen penawarannya kepada panitia. Metode ini ada 3 (tiga) macam yaitu⁶⁶ ;

1) Metode Satu Sampul

Dalam metode ini, dokumen-dokumen Administrasi, Teknis dan Penawaran Harga dimasukkan kedalam satu sampul tertutup untuk diserahkan kepada panitia pengadaan. Metode satu sampul ini lebih tepat digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat sederhana dan spesifikasi teknisnya jelas atau pengadaan dengan standar harga yang telah ditetapkan pemerintah atau pengadaan barang/jasa yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam dokumen pengadaan.

2) Metode Dua Sampul

Metode ini memisahkan antara dokumen administrasi dan teknis dengan dokumen harga, masing-masing dalam satu sampul. Metode ini

⁶⁶ Pasal 18, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

digunakan dalam hal diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam terhadap penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa dan untuk menjaga agar evaluasi teknis jangan sampai terpengaruh oleh besarnya penawaran harga.

3) Metode Dua Tahap

Metode Dua Tahap dapat digunakan untuk pengadaan barang/jasa berkaitan dengan penggunaan teknologi tinggi, kompleks dan resiko tinggi. Pada tahap pertama penyedia barang/jasa memasukkan sampul penawaran yang berisi persyaratan administrasi dan teknis lalu dievaluasi oleh panitia. Setelah lulus tahap pertama baru panitia meminta penyedia yang bersangkutan untuk memasukkan sampul kedua yang berisi penawaran harganya.

Dari hasil penelitian, semua dokumen pengadaan barang/jasa pemborongan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Barat Tahun anggaran 2006 dan 2007 semuanya memakai metode penyampaian dokumen penawaran dengan sistem Satu Sampul.

Metode Evaluasi Penawaran adalah metode yang digunakan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan kelengkapan data administrasi serta menganalisa dan menilai dokumen teknis dan dokumen penawaran.

Adapun Metode evaluasi terdiri dari⁶⁷ :

a) Metode Evaluasi Sistem Gugur

Sistem Gugur ini pada umumnya digunakan pada evaluasi penawaran jasa pemborongan. Metode ini melakukan penilaian secara berjenjang. Yang pertama dinilai adalah dokumen administrasi. Apabila sesuai dengan yang dipersyaratkan maka dilanjutkan dengan penilaian teknis. Perusahaan yang administrasinya kurang lengkap, langsung digugurkan saat itu juga dan tidak mengikuti penilaian teknis. Selanjutnya dilakukan penilaian teknis terhadap spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan. Apabila sesuai dengan yang dibutuhkan maka langsung dilanjutkan dengan pembukaan harga. Bagi perusahaan yang tidak lulus teknis langsung digugurkan saat itu juga walaupun harganya termurah.

Kemudian, seluruh perusahaan yang telah lulus administrasi dan teknis, dibuka penawaran harganya. Dan harga terendahlah yang dinyatakan memenangkan pengadaan. Namun didalam pelaksanaan sehari-hari, sistem ini biasanya dibalik. Pada saat pembukaan penawaran, langsung membuka harga penawaran dari seluruh peserta. Yang diperiksa administrasi dan teknisnya adalah perusahaan yang berada pada urutan 1 hingga 3 terendah didalam penawaran harganya.

⁶⁷ Pasal 19, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b) Metode evaluasi sistem nilai

Metode evaluasi ini dilakukan dengan memberikan nilai angka tertentu kepada setiap unsur didalam penawaran. Kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta, dimana nilai tertinggilah yang dinyatakan menang. Biasanya, metode ini dilakukan untuk pekerjaan yang sangat memperhatikan kualitas teknis dibanding dengan harga. Pengadaan yang mengutamakan kualitas barang atau pekerjaan, metode inilah yang terbaik.

c) Metode Evaluasi Biaya Selama Umur Ekonomis

Sistem evaluasi ini mirip dengan evaluasi sistem nilai. Dimana nilai ditetapkan kepada barang dengan melihat umur ekonomisnya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan didalam dokumen pengadaan. Evaluasi ini biasanya digunakan kepada proses pengadaan yang sangat memperhatikan nilai susut barang.

Dari hasil wawancara pada tanggal 24 Juli 2008 dengan Bapak Rafid Anwar, BE pengelola teknis dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Wilayah Propinsi Sumatera Barat yang kebetulan sering sebagai pengelola teknis dan Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kanwil Departemen Hukum dan HAM Sumatera Barat, menyatakan bahwa metode evaluasi yang pada umumnya dipakai dalam pengadaan jasa pemborongan di Propinsi Sumatera Barat

adalah Metode Sistem Gugur karena evaluasinya cepat dalam memberikan hasil akhir. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Barat dalam semua kegiatan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2006 dan 2007 juga memakai Sistem Gugur dalam evaluasi penawaran.

d. Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Jadwal pelaksanaan perlu disusun agar pengadaan barang dapat dilaksanakan secara sistematis dalam waktu yang seefisien mungkin. Jadwal pengadaan disusun oleh panitia pengadaan berdasarkan dokumen lelang. Jadwal pengadaan penting untuk dasar dan acuan panitia dalam melaksanakan pengadaan, sebagai alat pengguna dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan, serta acuan bagi penyedia barang dalam mendaftar, mengambil dokumen pengadaan, menyusun dan menyampaikan dokumen unjuk kemampuan dan dokumen penawaran.

Untuk menyusun jadwal pengadaan, panitia perlu menyusun seluruh kegiatan pada proses pengadaan serta menentukan alokasi waktu untuk setiap kegiatan tersebut. Alokasi waktu yang dialokasikan untuk masing-masing tahapan proses tergantung dari sifat dan jenis pengadaan barang yang akan dilaksanakan. Pada dasarnya dalam mengalokasikan waktu, harus mempertimbangkan pemberian waktu yang cukup untuk panitia dalam mempersiapkan dan menyusun semua dokumen lelang serta waktu yang cukup untuk melakukan evaluasi, baik untuk mengevaluasi dokumen unjuk kemampuan maupun dokumen penawaran. Bagi peserta diberi waktu yang

cukup untuk mempersiapkan dokumen unjuk kemampuan dan dokumen penawaran yang harus dipersiapkan dan bagi panitia untuk memproses pelaksanaan pengadaan. Misalnya untuk pekerjaan yang sulit dialokasikan waktu yang lebih lama dari kegiatan yang tidak sulit.

e. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

HPS atau *owners estimate (OE)* adalah perhitungan biaya pekerjaan pengadaan barang sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen lelang. Syarat-syarat dimaksud antara lain adalah jumlah, mutu/spesifikasi teknis, jenis dan jumlah barang yang akan dibeli, waktu penyerahan dan tempat penerimaan bahan. HPS disusun secara keahlian oleh panitia pengadaan sebagai acuan evaluasi dan negosiasi dengan calon penyedia. HPS dibuat atau disusun menjelang pelaksanaan pengadaan.

Untuk menyusun HPS perlu mempelajari dokumen lelang secara seksama. Dari dokumen lelang tersebut dapat diidentifikasi jenis, dan jumlah barang yang akan dilaksanakan. Berdasarkan dokumen lelang tersebut juga dapat diidentifikasi kegiatan pendukung yang diperlukan misalnya pengangkutan, asuransi dan lain-lain. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut dapat disusun daftar jenis barang serta volumenya. Untuk menghitung biaya diperlukan data harga satuan dari masing-masing jenis barang berdasarkan harga pasar.

f. Penyusunan Dokumen Lelang

Dokumen lelang adalah suatu dokumen yang memuat persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan, dan keterangan/informasi yang harus diikuti serta dipenuhi baik oleh pengguna maupun penyedia barang dalam rangka memilih calon penyedia barang yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang yang akan dilaksanakan.

Dokumen lelang merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses pengadaan barang. Dokumen tersebut akan menjadi dasar hukum bagi para pihak dalam proses pengadaan yaitu pihak pengguna termasuk panitia pengadaan dan pihak penyedia barang.

Bagi pengguna dan panitia dokumen lelang tersebut akan menjadi dasar dan acuan dalam melaksanakan pengadaan dan mengevaluasi dokumen penawaran. Bagi calon penyedia barang akan menjadi dasar dan acuan dalam menyusun, menyampul dan menyampaikan dokumen kepada panitia pengadaan.

Dokumen lelang disusun oleh panitia pengadaan barang dan akan disampaikan kepada calon penyedia barang. Sebagai dasar untuk menyusun dokumen lelang adalah dokumen perencanaan proyek, khususnya dokumen spesifikasi teknis dan gambar-gambar rencana, dokumen paket dan jadwal pengadaan dan dokumen petunjuk pelaksanaan pengadaan.

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut panitia mengidentifikasi tentang klasifikasi bidang pengadaan barang yang akan diadakan, pengalaman penyedia barang yang diperlukan, kemampuan penyedia barang dalam

menyediakan peralatan yang diharapkan, serta kemampuan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Hasil identifikasi dan analisa hal-hal tersebut digunakan oleh panitia pengadaan dalam merumuskan dan menyusun dokumen lelang termasuk dalam merumuskan dan menetapkan ketentuan tentang sistem dan tata cara evaluasinya.

Isi dokumen lelang pada umumnya terdiri dari: surat undangan, instruksi umum, instruksi khusus, daftar kuantitas dan harga, spesifikasi gambar-gambar, format surat penawaran, jaminan uang muka, pelaksanaan, dan naskah draft kontrak.

Pada kegiatan Pembinaan Sarana dan Prasarana Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Barat tahun anggaran 2006 dan 2007 yang menjadi konsultan perencana dan pemborong adalah :

Tabel 4 Daftar Konsultan Perencana Pembangunan Sarana dan Prasana TA 2006-2007

No	BANGUNAN	PAKET KEGIATAN	PAGU (RP)	KONSULTAN PERENCANA	KONTRAK (RP)	METODE PEMILIHAN
1	Kantor	Pembangunan gedung dua lantai	1.815.000.000	CV. Korona Karya	78.880.000	Seleksi Langsung
2	Rumah Dinas Air Tawar, 1 unit	-Rehab Rumah	84.600.000	- CV. Korona Karya	*	- Penunjukan Langsung
		-Rehab Pagar, Saluran kllg & Penimbunan Halaman	44.907.000	- CV. Korona Karya	*	- Penunjukan Langsung
3	Rumah dinas Parupuk, 2 unit	-Rehab Rumah & Rehab Pagar	97.708.000	CV. Korona Karya	*	Penunjukan Langsung
4	Rumah Dinas Gurun Laweh, 1 unit	-Rehab Rumah, Rehab Pagar & Saluran kllg	47.240.000	CV. Korona Karya	*	Penunjukan Langsung

5	Rumah Dinas Kakanwil, 1 unit	Renovasi Rumah	425.859.000	CV. Inkatim	23.500.000	Penunjukan Langsung
6	Kantor	Penimbunan halaman, perbaikan saluran dan pemasangan pavin blok	93.230.000	CV. Korona Karya	*	Penunjukan Langsung

- Kontrak digabung jadi satu dengan nilai Rp. 22.442.000,00

Sumber : Diolah dari dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat tahun 2006-2007

Tabel 5 Daftar Pemborong Pembangunan Sarana dan Prasana TA 2006-2007

No	BANGUNAN	PAKET KEGIATAN	PAGU (RP)	KONTRAK (RP)	KONTRAKTOR	METODE PEMILIHAN
1	Kantor	Pembangunan gedung dua lantai	1.815.000.000	1.305.054.000	PT. Diky Cipta Perkasa	Pelelangan Umum
2	Rumah Dinas Air Tawar, 1 unit	-Rehab Rumah -Rehab Pagar, Saluran kllg & Penimbunan Halaman	-84.600.000 -44.907.000	-73.823.000 -39.428.000	-CV. Biro Konstruksi -CV. Biro Konstruksi	- Pemilihan Langsung - Penunjukan Langsung
3	Rumah dinas Parupuk, 2 unit	-Rehab Rumah & Rehab Pagar	97.708.000	85.204.000	CV. Alam Indah	Pemilihan Langsung
4	Rumah Dinas Gurun Laweh, 1 unit	-Rehab Rumah Rehab Pagar & Saluran kllg	47.240.000	41.500.000	CV. Alam Megah	Penunjukan Langsung
5	Rumah Dinas Kakanwil, 1 unit	Renovasi Rumah	425.859.000	301.177.000	CV. Suryana	Pelelangan Umum
6	Kantor	Penimbunan halaman, perbaikan saluran dan pemasangan pavin blok	93.230.000	81.538.000	CV. Biro Konstruksi	Pemilihan Langsung

Sumber : Diolah dari dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat tahun 2006-2007

a) Pengumuman

Pengumuman dibuat oleh Panitia Pengadaan dengan maksud adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat luas, khususnya penyedia barang/jasa agar mengetahui adanya rencana pengadaan barang/jasa yang akan diadakan, sebagai salah satu wujud pelaksanaan prinsip dasar pengadaan barang/jasa. Dengan diumumkan secara luas, maka panitia akan mendapatkan calon penyedia barang/jasa sebanyak-banyaknya, sehingga dalam pelaksanaan lelang akan terjadi kompetisi yang sehat.

Pengumuman pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum dan pelelangan terbatas wajib dilakukan⁶⁸ :

- 1) Untuk pengadaan dengan metode pelelangan umum yang bernilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diumumkan sekurang-kurangnya di :
 - a) Satu surat kabar propinsi dilokasi kegiatan bersangkutan;
 - b) Satu surat kabar nasional, dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan kegiatan tersebut yang berdomisili dipropinsi kurang dari 3 (tiga) penyedia barang/jasa.
- 2) Untuk pengadaan pelelangan umum/terbatas yang bernilai diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) diumumkan sekurang-kurangnya disatu

⁶⁸ Perpres Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 20A

surat kabar nasional dan satu surat kabar propinsi dilokasi kegiatan bersangkutan.

Pengumuman tersebut memuat informasi tentang-tentang hal-hal sebagai berikut : Nama dan alamat pengguna barang/jasa yang akan mengadakan pelelangan; Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dibeli; perkiraan nilai pekerjaan; syarat-syarat peserta lelang; tempat, hari, tanggal dan waktu pengambilan dokumen lelang/dokumen pengadaan.

Panitia pembinaan sarana dan prasarana Kanwil. Hukum dan HAM Sumatera Barat tahun 2006 dan 2007 telah melaksanakan pengumuman sesuai dengan ketentuan tersebut diatas.

b) Pendaftaran calon peserta lelang dan pengambilan dokumen pengadaan

Kegiatan mendaftar adalah kegiatan pencatatan data para penyedia barang/jasa yang mendaftar dan memenuhi syarat untuk mengikuti lelang oleh panitia.

Pada jangka waktu yang telah ditentukan dalam pengumuman panitia harus siap melayani pendaftaran para calon penyedia barang/jasa yang berminat mengikuti lelang dan panitia harus menyediakan dokumen lelang yang cukup untuk disampaikan kepada calon penyedia barang/jasa yang mendaftar dan memenuhi syarat. Pada jangka waktu tersebut para calon penyedia barang/jasa yang berminat mendaftar dengan membawa

dokumen atau keterangan lain yang dipersyaratkan. Penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat akan dicatat oleh panitia dan diberikan dokumen lelang sebagai acuan dalam menyusun dokumen penawaran/dokumen unjuk kemampuan.

c) Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*)

Adapun contoh proses pengadaan penyedia jasa pemborongan Pembangunan gedung dua lantai Kantor Wilayah tahun 2006.

Aanwijzing dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2006 yang dihadiri oleh 18 peserta/perusahaan. *Aanwijzing* adalah pertemuan penjelasan lisan dari pihak pemberi kerja dalam hal ini diwakili panitia pengadaan dihadapan seluruh calon peserta pelangan. Penjelasan dan tanya jawab dilakukan tentang teknis maupun administrasi, agar tidak terjadi perbedaan persepsi maupun kekeliruan dalam pengajuan penawarannya. Pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen lelang yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari panitia serta keterangan lain termasuk perubahannya, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditanda tangani oleh panitia pengadaan dan minimal satu wakil peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen lelang. Apabila BAP tersebut terdapat hal-hal/ketentuan-ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka panitia pengadaan harus menuangkannya kedalam adendum dokumen lelang yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen lelang dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta secara

5. Dokumen penawaran terdiri dari:

- a. Surat penawaran harga
- b. Rencana anggaran biaya (RAB)
- c. Analisa harga satuan pekerjaan
- d. Daftar satuan upah dan bahan
- e. Metoda pelaksanaan
- f. Jadwal pelaksanaan (time schedule)
- g. Daftar personil inti yang ditempatkan secara penuh untuk pekerjaan ini
- h. Struktur organisasi yang ditempatkan pada kegiatan tersebut
- i. Daftar peralatan
- j. Bagian pekerjaan yang disubkan (jika ada)
- k. Surat jaminan penawaran
- l. Foto copy SKA (memperlihatkan asli sewaktu pembukaan penawaran)

6. Personil inti minimal yang diminta untuk pekerjaan ini:

1. Lulusan S-1 Sipil = 1 orang (pengl. 5 tahun) dilengkapi fotocopy ijazah
Lulusan S- 1 Arsitek = 1 orang (pengl. 5 tahun) dilengkapi fotocopy ijazah
Lulusan SMK/STM = 1 orang (pengl. 4 Tahun) dilengkapi fotocopy ijazah
2. Lulus SLTA = 2 orang (pengl. 4 tahun) dilengkapi fotocopy ijazah

7. Peralatan minimal yang diminta untuk pekerjaan ini:

8. Dump Truck = 1 unit dilengkapi fotocopy kepemilikan
9. Sewa Beton Molen = 2 unit dilengkapi fotocopy kepemilikan / sewa
10. Vibrator = 2 Unit dilengkapi fotocopy kepemilikan / sewa
11. Pompa Air = 2 Unit dilengkapi fotocopy kepemilikan / sewa
12. Stamper = 1 Unit dilengkapi fotocopy kepemilikan / sewa

8. Dokumen penawaran dibuat rangka 3(tiga), 1(satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap rekaman/foto copy

9. Surat penawaran ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Sarana dan Prasarana Kanwil Departemen Hukum dan HAM Sumatera Barat

10. Surat penawaran diberi materai Rp. 6.000,- diberi tanggal dan ditanda tangani oleh pemimpin/direktur perusahaan atau yang diberi kuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahan perusahaan.
11. Jangka waktu pelaksanaan 135 (Seratus tiga puluh lima) hari kalender tenggang waktu penawaran 60 (Enam puluh) hari kalender.
12. Jaminan penawaran ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Sarana dan Prasarana Kanwil Departemen Hukum dan HAM Sumatera Barat.
13. Jaminan penawaran diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk BPR) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian yang mempunyai dukungan sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI. Masa berlaku jaminan penawaran 90 (Sembilan puluh) hari kalender dengan besar jaminan penawaran sebesar 1% s/d 3% dari HPS/OE.
14. Dokumen kualifikasi dibuat 1(satu) rangkap
Dokumen kualifikasi terdiri dari:
 - a. Formulir surat pernyataan minat (form I a)
 - b. Formuflr Fakta integritas (form I c)
 - c. Formulir isian penilaian kualifikasi (form 1 b) terdiri dari:
 - 1) Data administrasi
 - 2) Ijin usaha
 - 3) Landasan hukum pendirian perusahaan (melampirkan foto copy akte pendirian perusahaan beserta perubahan bila ada).
 - 4) Pengurus perusahaan
 - 5) Data keuangan (melampirkan foto copy bukti pelunasan pajak fahunan don masa 3 bulan terakhir)
 - 6) Data personalia
 - 7) Data peralatan / perlengkapan
 - 8) Data pengalaman perusahaan
 - 9) Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan
 - 10) Modal kerja
15. Penulisan nilai penawaran dalam surat penawaran adalah dalam angka dan huruf. Apabila terdapat perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf.

22. Sebelum dievaluasi administrasi, teknis dan harga panitia akan melakukan koreksi aritmatik terhadap semua penawaran yang masuk, dan hasil aritmatik dapat merubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula.
23. Penawaran dinyatakan gugur sewaktu evaluasi dokumen penawaran adalah sebagai berikut:

Administrasi

1. Surat penawaran

- a. Surat penawaran tidak ditanda tangani oleh pimpinan/direktur atau penerima kuasa dari direktur yang nama penerima tercantum dalam akte pendirian atau perubahan perusahaan
- b. Jangka waktu berlakunya surat penawaran kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadang/pelelangan
- c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan / lelang
- d. Tidak bermaterai dan bertanggal
- e. Tidak mencantumkan masa berlakunya penawaran

2. Jaminan penawaran

- a. Jaminan penawaran tidak dikeluarkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian
- b. Besar jaminan kurang dari nilai nominal yang dipersyaratkan dokumen pengadaan/lelang
- c. Masa berlakunya kurang dan waktu yang ditetapkan atau tidak sesuai dengan dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan/lelang
- d. Tidak mencantumkan besar nilai jaminan penawaran dalam angka dan huruf
- e. Nama pengguna barang dan jasa yang menerima jaminan penawaran tidak sama dengan nama pengguna barang dan jasa yang mengadakan pelelangan
- f. Nama paket pekerjaan yang dijamin tidak sama dengan nama paket pekerjaan yang dilelangkan
- g. Isi surat jaminan penawaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan/lelang

3. Syarat-syarat atau dokumen lainnya yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan/lelang dan Risalah Aanwijzing tidak dapat

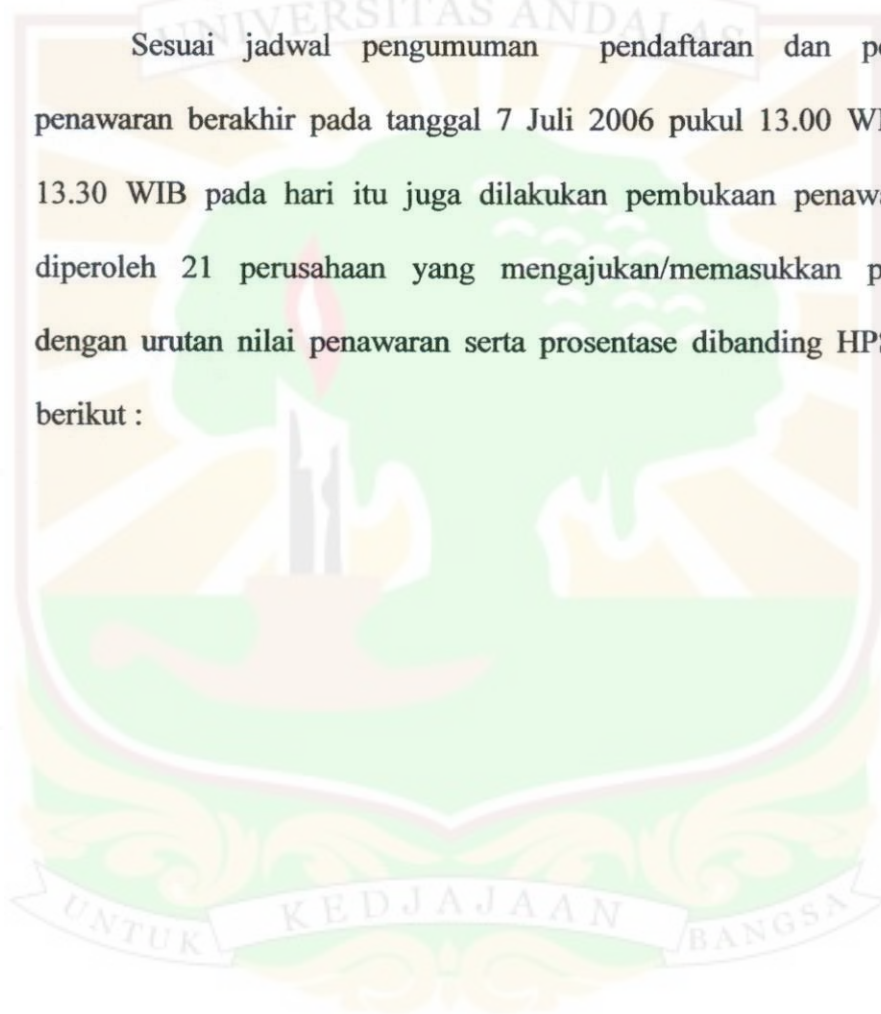
- d. Apabila dan hasil klarifikasi, harga penawaran terbukti terlalu rendah dan peserta lelang tetap menyatakan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen lelang maka peserta lelang harus bersedia menaikan jaminan pelaksanaannya menjadi sekurang-kurangnya persentase jaminan pelaksanaan ditetapkan dalam dokumen lelang dikalikan 80% dari HPS/OE, bilamana ditunjuk sebagai pemenang lelang. Dalam hal peserta lelang menyatakan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen pengadaan / lelang atau tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan pekerjaan maka penawaran digugurkan dan jaminan penawarannya dicairkan dan disetor pada kas Negara dan penawar di **BLACK LIST** selama 1(satu) tahun dan tidak diperkenankan ikut serta dalam pelelangan pada instansi pemerintah.
25. Penilaian Kualifikasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen kualifikasi / Risalah Aanwijzing.
26. Pembuktian kualifikasi
Terhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan konfirmasi dengan instansi terkait.
27. Penetapan pemenang lelang
Panitia pengadaan barang/jasa menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi Negara dalam arti:
- a. Penawaran memenuhi syarat administrasi dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pengadaan / lelang
 - b. Harga yang ditawarkan terendah yang responsive
 - c. Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri
 - d. Penawaran tersebut adalah terendah diantara penawaran yang memenuhi persyaratan
- d. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran**

Metode penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang.

Metode penyampaian dokumen penawaran harus dijelaskan pada waktu

segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran terhadap semua penawaran yang masuk. Setelah dibacakan dengan jelas, berita acara ditandatangani oleh panitia yang hadir dan dua orang wakil peserta lelang yang sah yang ditunjuk oleh para peserta lelang yang hadir. Kemudian berita acara pembukaan penawaran tersebut dibagikan kepada semua peserta yang hadir.

Sesuai jadwal pengumuman pendaftaran dan pemasukan penawaran berakhir pada tanggal 7 Juli 2006 pukul 13.00 WIB. Pukul 13.30 WIB pada hari itu juga dilakukan pembukaan penawaran, dan diperoleh 21 perusahaan yang mengajukan/memasukkan penawaran dengan urutan nilai penawaran serta prosentase dibanding HPS sebagai berikut :



Tabel 6 Daftar Harga Penawaran Peserta Pelelangan Umum Pembangunan Gedung Dua Lantai Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat tahun 2006

NO	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN	PROSENTASE HPS
1.	PT. Combi Costraco	Rp. 1.240.000.000,00	74,45 %
2.	PT. Langgeng Griyadwipa	Rp. 1.248.390.899,00	74,96 %
3.	PT. Aditya Putra Utama	Rp. 1.275.229.000,00	76,57 %
4.	PT. Jaya Utama Ekasari	Rp. 1.285.000.000,00	77,16 %
5.	PT. Bina Industri Nusantara	Rp. 1.290.132.000,00	77,46 %
6.	PT. Cipta Putra	Rp. 1.291.231.000,00	77,53 %
7.	PT. Multicaya Sarana Prakasa	Rp. 1.294.420.000,00	77,72 %
8.	PT. Deky Cipta Perkasa	Rp. 1.305.054.000,00	78,36 %
9.	PT. Rerim Pratama Comexindo	Rp. 1.305.788.000,00	78,40 %
10.	PT. Sultan Affant Permana	Rp. 1.320.000.000,00	79,26 %
11.	PT. Primajasa Tirtalina	Rp. 1.325.010.000,00	79,56 %
12.	PT. Diplomad Surya Nugraha	Rp. 1.329.999.000,00	79,86%
13.	PT. Iso Iki Asano	Rp. 1.332.536.000,00	80,00 %
14.	PT. Prindos Jaya	Rp. 1.332.659.000,00	80,01 %
15.	PT. A r e a	Rp. 1.337.423.000,00	80,30 %
16.	PT. Total Akselerasi Construksi	Rp. 1.347.089.000,00	80,69 %
17.	PT. Kualitas Insan Amalia	Rp. 1.349.274.000,00	80,88 %
18.	PT. Hariyona	Rp. 1.440.000.000,00	86,46 %
19.	PT. Astrinindo Mitra	Rp. 1.515.122.000,00	90,97 %
20.	PT. Kelok 1 Ratama	Rp. 1.520.122.000,00	91,21 %
21.	PT. Sabananyo Kanti Kito	Rp. 1.630.453.000,00	97,90 %

Sumber: Berita Acara Pembukaan Penawaran Pelelangan Umum Pembangunan Gedung Dua Lantai Kanwil.Dep.Hukum dan HAM Sumatera Barat tahun 2006

e. Evaluasi Penawaran

Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh panitia pengadaan terhadap semua penawaran yang masuk. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis dan harga berdasarkan kriteria, metode dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang.

Pada tahap awal panitia pengadaan melakukan koreksi aritmatik terhadap semua penawaran yang masuk dan melakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar terendah setelah koreksi aritmatik.

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila⁷⁰ :

- 1) Syarat-syarat yang diminta berdasarkan dokumen lelang dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang;
- 2) Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) yang dapat merugikan negara atau peserta lain;
- 3) Surat jaminan harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang;
- 4) Surat penawaran ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan atau perubahannya, atau kepala cabang yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan bukti otentik. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Serta jangka waktu pelaksanaan tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang.
- 5) Telah melunasi kewajiban membayar pajak tahun terakhir;

Panitia melakukan evaluasi teknis terhadap semua penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila⁷¹ :

- a) Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen lelang;
- b) Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang;
- c) Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan dokumen lelang;
- d) Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen lelang;
- e) Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan diajukan;

⁷⁰ Ibid Lampiran I Bab II huruf f

⁷¹ Ibid.

- f) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen lelang;
- g) Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen lelang.

Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga, sedangkan terhadap penawaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan gugur.

Setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis maupun kewajaran harga maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Penawar terendah yaitu Combi Constraco tidak lulus persyaratan administrasi;
- 2) Penawar terendah dua sampai tujuh tidak lulus persyaratan teknis dimana metoda persyaratan substantif tidak terpenuhi.
- 3) Pemenang hasil evaluasi panitia adalah urutan penawaran terendah keenam yaitu PT. Deky Cipta Perkasa dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.305.054.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta lima puluh empat ribu rupiah), dengan pemenang cadangan I dan II adalah PT. Rerin Pratama Camexindo nilai penawaran Rp. 1.305.788.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan PT. Sultan Affant Permana dengan nilai penawaran Rp. 1.320.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

kontraktor menyerahkan jaminan pelaksanaan sebagaimana yang telah ditentukan waktu klarifikasi. Nilai kontrak adalah sebesar Rp. 1.305.054.000,00 (satu milyar tiga ratus lima juta lima puluh empat ribu rupiah) dengan masa pekerjaan 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender yaitu sejak ditandatanganinya kontrak tanggal 9 Agustus 2006 sampai dengan 21 Desember 2006.

h. Pelaksanaan Kontrak

Setelah pelelangan selesai dan pemenang pelelang telah ditunjuk kemudian kontrak pemborongan telah ditandatanganinya, maka telah terjadi hubungan hukum antara kontraktor dengan pemilik proyek/pemberi kerja yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dasar hubungannya adalah perjanjian/kontrak. Hubungan ini disebut hubungan kontraktual. Oleh karena itu kontraktor dan PPK dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan terikat pada kontrak dan dokumen kontrak yang telah disetujui. Persetujuan telah terjadi dengan ditandatanganinya kontrak/perjanjian pemborongan oleh kedua belah pihak yaitu PPK sebagai Pihak I (pertama) dan kontraktor yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan sebagai Pihak II (kedua). Sebelum pekerjaan dilaksanakan kontraktor dapat meminta pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak dan pemborong harus menyerahkan jaminan uang muka sebesar uang muka yang diminta, dari bank yang diminta. Pembayaran uang muka itu kembali akan diperhitungkan berangsur-angsur secara merata pada tahap

menyelesaikan pekerjaan hanya 65,145 % akibatnya PT.Deky Cipta Perkasa didenda keterlambatan pekerjaan sebesar 5 % dari nilai kontrak.

Dari hasil wawancara lewat telepon dengan Bapak Nasril, SH, MH sebagai PPK yang pada saat ini menjadi Widyaiswara di BPSDM Hukum dan HAM di Jakarta memberikan jawaban kenapa pembangunan gedung ini gagal diselesaikan sebagai berikut :

1. Pekerjaan proyek ini terlambat dimulai pelaksanaannya karena Surat Keputusan (SK) penunjukan sebagai PPK baru turun pertengahan Juni 2006, seharusnya pada awal tahun SK sudah diterbitkan, akibatnya waktu pelaksanaan pekerjaan terlalu singkat hanya bisa dibuat oleh konsultan 135 hari karena didesak berakhirnya tahun anggaran. Pada hal untuk pekerjaan pembangunan gedung baru dua lantai seperti itu paling tidak disediakan waktu 180 hari;
2. Panitia tidak cermat memilih kontraktor yang mana telah memilih PT. Deky Cipta Pratama yang tidak bonafit/tidak punya modal hanya mengharapkan uang termijn dari proyek saja. Selain itu ternyata pemimpin perusahaan tersebut tidak punya tanggung jawab moral yang kuat untuk menyelesaikan proyek tersebut. Sudah berulang kali diingat dan diancam secara lisan dilapangan dan didalam rapat tetap saja tidak bisa memacu pelaksanaan pekerjaan. Bahkan sudah dua kali kita layangkan surat peringatan namun tidak juga bisa menyelesaikan pekerjaan. Ketika kemudian ditanyakan kenapa tidak dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja, beliau

memberikan alasan bahwa terlalu kejam kita kalau melakukan pemutusan hubungan kerja, bisa hancur dia karena akibat pemutusan kerja tersebut adalah uang jaminannya dicairkan distor ke kas negara, dikenakan denda maksimal, dan dimasukkan ke daftar hitam (*black list*) . Sebagai umat yang beragama kita tidak boleh mencelakakan orang walaupun dia sangat menyakiti hati kita. Lagi pula filosofi atau prinsip Keppres nomor 80 tahun 2003 adalah membina pengusaha kecil. Walaupun klasifikasi perusahaan tersebut Menengah tapi modalnya sangat kecil, saya tidak tau dari mana dia dapat klasifikasi M tersebut. Dengan pertimbangan tersebut dan pertimbangan kemanusiaan juga saya tidak memberikan sanksi maksimal 10 % sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 Surat Perjanjian (Kontrak). Dilain pihak negara dalam hal ini tidak dirugikan secara keuangan karena realisasi fisik terakhir adalah sebanyak 65,145 % sedangkan realisasi keuangannya hanya 55,65% .

3. Panitia seharusnya tidak mengusulkan pemenang tender dari penawaran yang terendah setelah lolos evaluasi administrasi dan teknis. Lebih dari 10 % dibawah HPS itu menurut saya tidak wajar harganya. Tengok saja kontrak, sebagai contoh harga kayu balok bonio hanya Rp. 1.050.000,- perkubik padahal harga dipasaran lebih dari dua juta rupiah perkubik, itupun sulit mendapat kayu yang baik karena banyak truk-truk pengangkut kayu yang ditangkap polisi,

diduga kayu hasil *illegal logging*. Upah tukang hanya Rp. 29.000,- perorang perhari, tukang yang *sabana tukang* mana mau bekerja dibawah Rp. 60.000,- perhari. Belum lagi harga material yang lain sangat rendah harganya, saya sebagai pemilik toko bahan bangunan di Depok geleng kepala dibuatnya. Memang dari segi hukum saya sebagai PPL yang bertanggung jawab semuanya dalam hal ini. Kenapa saya setuju usulan panitia agar perusahaan itu ditetapkan sebagai pemenang tender dan selanjutnya mau menandatangani kontraknya. Namun saya tidak punya pilihan lain karena sudah didesak oleh waktu, selain itu masak saya tidak percaya pada panitia yang telah mengevaluasi dari berbagai aspek.

Pernyataan PPK ini berbeda dengan pendapat Rafid Anwar, BE, beliau menyatakan bahwa kalau bertitik tolak dari kewajaran harga memang tidak layak ditunjuk sebagai pemenang, namun dari 21 peserta yang memasukkan penawaran 18 peserta menawar lebih 10 % dibawah HPS dan malah 12 peserta yang menawar diatas 20 % dibawah HPS. Saya tidak mau ambil resiko tiga peserta yang menawar paling tinggi tersebut diusulkan sebagai pemenang. Peserta yang 18 itu pasti akan ribut dan ramai-ramai akan mengajukan keberatan, ujung-ujungnya tiap sebentar kita akan diperiksa baik dari Inspektorat, BPKP, BPK bahkan Kepolisian dan Kejaksaan apalagi sekarang ada KPK. Dalam Keppres nomor 80 tahun 2003 pada Lampiran I Bab II huruf i secara tegas menentukan bahwa :

Dari hasil penelitian, sebaiknya Keppres mengutamakan mutu hasil pekerjaan bukan yang termurah tapi mutunya tidak baik.

Dalam Lampiran I Bab II huruf i tersebut sebaiknya berbunyi :

Panitia/Pejabat pengadaan mengusulkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti :

- a) Penawaran memenuhi syarat administrasi dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
- b) Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah dan wajar;
- c) Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri;
- d) Penawaran tersebut adalah terendah diantara penawaran yang wajar harganya serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a) sampai dengan huruf c).

i. Serah Terima Pekerjaan

Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen), pemborong mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk menyerahkan pekerjaan. PPK sebelum melakukan serah terima hasil pekerjaan tersebut harus terlebih dahulu melakukan penilaian, apakah seluruh hasil pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Bilamana masih terdapat kekurangan dan/atau cacat pemborong wajib untuk memperbaiki/menyelesaikannya.

Pembayaran dilakukan sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5 % (lima persen) merupakan retensi

1. Bidang Hukum Administrasi Negara / Hukum Tata Usaha Negara

Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia barang dan jasa yang terjadi pada proses persiapan pengadaan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa instansi pemerintah merupakan hubungan Hukum Administrasi Negara (HAN) atau tata usaha negara. Dalam proses ini, pengguna barang/jasa instansi pemerintah (Kepala kantor/ satuan kerja/ pimpro/ pimbapro/ pejabat yang disamakan dengan pimpro), bertindak sebagai pejabat negara bukan mewakili negara sebagai individu/pribadi. Semua keputusan yang dikeluarkan pada proses ini merupakan keputusan pejabat negara atau publik.

Bidang hukum yang mengatur hukum antara pejabat negara dengan masyarakat adalah hukum administrasi negara atau tata usaha negara. Karena keputusan pengguna barang/ jasa instansi pemerintah merupakan keputusan pejabat negara, maka apabila ada pihak yang dirugikan (penyedia barang/jasa atau masyarakat) akibat dikeluarkannya keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis atas keputusan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam pasal 53 Undang-Undang tersebut berisi sebagai berikut:

- a. Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi atau direhabilitasi.
- b. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

staf dari Dinas teknis tersebut menangani banyak sekali pekerjaan serupa dari instansi pemerintah lain sehingga sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan;

- c. Pada umumnya pengusaha kita disini belum professional dalam menangani proyek dan pada waktu mengajukan penawaran asalan saja dan sangat rendah, asal mendapat pekerjaan saja, data yang dikemukakan pada waktu tender banyak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya akibatnya penyelesaian pekerjaan sering terlambat dan hasilnya kurang baik.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Barat tersebut telah dilakukan lakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam masalah dana/anggaran, karena kita adalah instansi vertikal dan dana bersumber dari APBN maka kita usulkan ke Departemen Hukum dan HAM pusat untuk dapat menyediakan anggaran untuk pos-pos yang seharusnya ada;
2. Untuk meningkatkan kompetensi SDM kita setiap tahun mengadakan diklat Pengadaan Barang dan Jasa serta Ujian Keahlian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah;
3. Untuk pelaksanaan evaluasi penawaran tender, Panitia dianjurkan agar selektif dalam melakukan kualifikasi perusahaan yang ikut tender dan harus menilai kewajaran harga yang ditawarkan.

Semua pola persekongkolan tender tersebut diatas biasa dilakukan oleh para pelaku. Permasalahan ini kemudian bisa teratasi berkat berlakunya Keppres Nomor 80 Tahun 2003 karena semua tender/pelelangan umum harus diumumkan secara luas melalui surat kabar dan tidak ada pembatasan wilayah. Badan usaha yang memenuhi syarat dari daerah mana saja di Indonesia boleh mengikuti tender diseluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian suatu tender akan banyak pesertanya. Banyaknya peserta tender akan sulit "diatur" oleh suatu badan usaha yang ingin memenangkan tender.

Selain itu menurut ketentuan Lampiran I Bab II huruf i, pemenang tender adalah penawaran terendah dan responsif, maka mengakibatkan peserta tender berlomba mengajukan penawaran paling rendah. Dengan harga rendah tersebut tidak mungkin salah satu peserta tender "mengamankan" sekian banyak peserta tender.

Persekongkolan tender berdasarkan uraian diatas tergolong sebagai persekongkolan horizontal yakni tindakan kerjasama yang dilakukan oleh para penawar tender. Selain dari persekongkolan tersebut, juga dikenal persekongkolan secara vertikal dimana kerjasama tersebut dilakukan antara penawar dengan panitia pelaksana tender. Dalam hal ini, biasanya panitia memberikan berbagai kemudahan atas persyaratan-persyaratan bagi seorang penawar, sehingga dia dapat memenangkan penawaran tersebut ⁷⁴.

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dinilai cukup mampu menangani persekongkolan tender secara horizontal, namun demikian persekongkolan tender secara vertikal diakui masih sering terjadi dan ini tentunya masih mendatangkan kerugian yang sama dengan bentuk persekongkolan horizontal, bahkan bisa

⁷⁴ *Ibid.*

mencapai 25,17% sedangkan menurut bobot rencana adalah 70,71% sehingga terjadi Deviasi keterlambatan sebanyak 45,54%.

Melalui Surat Teguran I dari kami dan secara lisan dilapangan sesudah sering kami ingatkan agar Saudara memacu pekerjaan dengan menambah tenaga tukang/buruh dan mencukupi material namun Saudara tetap tidak mengindahkannya. Oleh sebab itu melalui surat Teguran II ini sekali lagi kami mengingatkan bahwa kami hanya melakukan Teguran tertulis sampai tiga kali, setelah itu kami akan melakukan Pemutusan Hubungan kerja (Kontrak) secara sepihak dan Perusahaan Saudara akan kami usulkan supaya di "Black List".

Selanjutnya untuk mengecor lantai Tingkat II harus dengan mesin dan tidak secara manual agar supaya mempercepat penyelesaian dan hasilnya lebih baik.

D. Analisis terhadap Pengadaan Barang/Jasa dan Kendala-kendala yang dihadapi dalam Proses Pemborongan Bangunan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat Tahun 2006-2007

Sesuai dengan kerangka teoritis penelitian pada Bab I, maka pembahasan penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum, *good governance*, dan aspek Hukum Perjanjian guna menjawab masalah yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.

1) Teori efektivitas hukum

Dalam penelitian ini, subjek dari aturan hukum yang dimaksud adalah Keppres No.80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Peraturan-peraturan lanjutan sebagai perubahannya, dimana Keppres ini ditujukan sebagai alat kontrol guna menciptakan tertib hukum dalam

Barat Tahun 2006-2007, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Keppres 80 Tahun 2003. Pengumuman lelang sudah dilakukan melalui surat kabar lokal dan nasional dan papan pengumuman resmi dan selalu melakukan *aanwijzing* dalam proses pelelangan

b) Partisipasi

Partisipasi masyarakat ternyata masih kurang, hal ini terbukti pada pelaksanaan proses pengadaan jasa pemborongan tahun 2006 dan 2007 tidak ada satupun sanggahan yang masuk terhadap pengumuman pemenang lelang. Begitu juga dengan terbengkalainya pembangunan gedung dua lantai tahun 2006 tidak ada masyarakat yang mempertanyakan baik secara langsung maupun pemberitaan di surat kabar.

c) Akuntabilitas

Pembangunan gedung dua lantai yang dilaksanakan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Barat tahun 2006 ternyata tidak mencapai sasaran, baik fisik maupun keuangan. Realisasi fisik hanya tercapai 65,145 % dan keuangan 55,65 % sehingga gedung tersebut terbengkalai atau tidak bisa dimanfaatkan

3) Aspek Hukum Perjanjian

Semua pelaksanaan pemborongan bangunan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Barat didasarkan pada kontrak yang ditandatangani oleh PPL atau Kuasa Pengguna Anggaran dengan pemborong.

Kontrak telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terjadi wanprestasi juga telah diterapkan sanksi sesuai kontrak.

surat perjanjian kami akan menjatuhkan sanksi pada saudara berupa denda sebanyak 5% dari nilai kontrak.

2. Sekali lagi kami ingatkan bahwa kewajiban-kewajiban Saudara berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bukti Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) harus segera diserahkan pada kami.
3. Saudara harus merapikan halaman, Mushalla dan lingkungan kantor maupun kerusakan lain yang diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pemborongan Bangunan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat belum sepenuhnya sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ini dibuktikan dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam penentuan paket pekerjaan rehab rumah dinas di Air Tawar tahun 2007 ada indikasi menghindari Pelelangan Umum;
 - b. Dalam pemilihan jasa konsultasi tahun 2006 dan 2007 hanya formalitas saja. Dari 6 (enam) kegiatan, 5 (lima) kegiatan perencanaannya dilaksanakan hanya oleh satu perusahaan. Konsultan yang akan melaksanakan perencanaan sudah ditentukan sebelum proses pengadaannya dilaksanakan.
2. Tidak optimalnya hasil pekerjaan pemborongan antara lain adalah disebabkan karena kurangnya pengawasan, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses Pengadaan Penyedia Jasa Pemborongan Bangunan Di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat adalah :
 - a. Ada pos tertentu yang seharusnya didukung oleh dana tapi tidak tersedia anggarannya;

- b. Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan staf untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa terutama dalam pekerjaan kontruksi, sementara itu staf pengelola teknis dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman/PU jumlahnya terbatas dan menangani banyak sekali pekerjaan serupa dari instansi pemerintah lain sehingga sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- c. Pada umumnya pengusaha daerah propinsi Sumatera Barat belum professional dalam menangani proyek. Pada waktu mengajukan penawaran asalan saja dan mengajukan harga penawaran tidak wajar dan terlalu rendah, asal untuk mendapat pekerjaan saja, data yang dikemukakan pada waktu tender tidak sesuai dengan yang sebenarnya akibatnya penyelesaian pekerjaan sering terlambat dan hasilnya pekerjaan tidak optimal dan bahkan ada yang gagal untuk menyelesaikan pekerjaan.
- d. Ketentuan Lampiran I Bab II huruf i Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang menetapkan pemenang lelang adalah penawar terendah dan responsif ternyata tidak efektif diberlakukan untuk semua daerah dan semua pekerjaan pengadaan barang/jasa. Terutama untuk pekerjaan konstruksi pembangunan gedung, nilai kontrak yang murah dan tidak wajar akan berakibat rendahnya mutu bangunan dan bahkan bisa gagalnya penyelesaian pekerjaan. Selain itu ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan pasal 20 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak Sehat yang melarang penyedia barang/jasa menawarkan harga yang sangat rendah atau jual rugi.

Disarankan juga ketentuan bolehnya dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Pekerjaan Lanjutan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, juga diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Djaja, Komariah Emong Sapar. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Djumialdji, FX. 1987. *Perjanjian Pemborongan*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Fuady, Munir . 2001. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Edisi II*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M.. 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajahmada University Pers.
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kansil, CST. 1979. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Terjemahan Raisul Muttaqin)*. Bandung : Nuansa.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Adminstrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Marbun, SF. 2001. *Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Indonesia, tulisan pada Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. "*Hukum Perikatan*". Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Mutiar'as, D. *Ilmu Tata Negara Umum*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Poerwadarminta, WJS. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Saherodji. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Aksara Baru.
- Salman, Otje. 1989. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.

- Samijo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit CV. Armico.
- Saptomo, Ade. 2007. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Press.
- Siswanto, Ari. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchun. 1982. *Hukum Bangunan Perjanjian Penzborongan Bangunan*. Yokyakarta: Liberty.
- Somim, Soedhary. *Kitab Undang - Undang Hukum Dagang*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- _____, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Soejono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1980. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soepomo, Imam. 1979. *Hukum Perburuhan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan* Penerbit Jembatan.
- Subekti. 1977. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- _____. 1986. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sugianto & Gianto Bambang. 2001. *Hukum Adminsitasi Negara*. Jakarta: Lembaga Administrsi Negara Republik Indonesia.
- Sujanto, Adi. 2007. *Moral dan Etika Kepemimpinan merupakan Landasan ke arah Kepemerintahan yang Baik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Sunggono, Bambang. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunindhia, Y.W dan Ninik Widyanti. 1990, *Adminstrasi Negara dan Peradilan Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Utecht. 1960. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, ed ke 4. Bandung: Fakultas Hukum UNPAD.

Widodo M.S , Dr. Joko. 2007. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayumedia.

B. Laporan penelitian, Makalah, Jurnal

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007, "*Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan Good Governance Pada Dunia Usaha*", Laporan Penelitian.

Indonesia Prosurement Watch, 2006, *Daftar Simak Monitoring Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*.

Indonesia Prosurement Watch, 2006, *Prinsip-prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*.

Indonesia Prosurement Watch, 2007, *Kerangka Dasar dan Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*.

Indonesia Prosurement Watch, 2007, *Manual Penerapan Pakta Integritas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*.

Indonesia Prosurement Watch, 2007, *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*.

Indonesia Prosurement Watch, 2007, *Toolkit Anti Korupsi Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*.

Anggraini, A.M Tri, 2006 "Penegakan Hukum dan Sanksi Dalam Persekongkolan Penawaran Tender" *Jurnal Legislasi Indonesia* 3(4): 47-71.

Rosari, Anton. 2005. *Undue Influence Dalam Transaksi Jual Beli Property Di Kota Pekanbaru*. Tesis. PPS UNAD: Padang.

Dokumen Lelang Pengadaan Barang Untuk Pembinaan sarana dan Prasarana Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat antara Panitia Pengadaan

Barang/Jasa Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia dengan CV. Korona Karya

C. Undang-undang

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

